

**LAPORAN KINERJA  
AKUNTABILITAS  
DIREKTORAT PENGOLAHAN  
DAN BINA MUTU  
TAHUN 2023**

*DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU  
DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN*

**2023**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Periode Tahun 2023.

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada *stakeholders* sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP Tahun 2023 adalah Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 serta Target Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2023 berikut realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

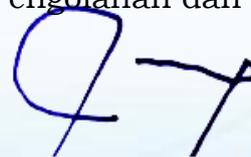
Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP.

Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan



kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terkait sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui *email*: [direktoratpbm@gmail.com](mailto:direktoratpbm@gmail.com). Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Januari 2024  
Direktur Pengolahan dan Bina Mutu



Widya Rusyanto

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Tahun 2023 disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja (*Performance Results*) Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP selama periode Tahun 2023, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2020 - 2024.

Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP melakukan pengukuran terhadap Kegiatan Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan untuk mencapai tujuan strategis meningkatkan volume produk olahan kelautan dan perikanan. Tujuan strategis tersebut selanjutnya dijabarkan dalam sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP yang telah ditetapkan dalam bentuk perjanjian kinerja antara Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dengan Direktur Jenderal PDSPKP, yang terdiri atas 11 (sebelas) Sasaran Strategis (SS) dan 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja (IK) yang menjadi target Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

Capaian indikator kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu telah tercapai keseluruhan dari 25 indikator yang ditetapkan. Terdapat 8 indikator berpredikat Istimewa dan 17 indikator berpredikat Baik. Secara rata-rata capaian realisasi indikator kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu berpredikat Baik dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang ditunjukkan dalam aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id* adalah 105,24%.

Pencapaian Sasaran Indikator Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023 adalah sebagai berikut:



1. Dari 25 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 18 indikator kinerja bersifat tahunan, 1 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 6 indikator kinerja bersifat triwulanan;
2. Terdapat 16 indikator kinerja yang capaian realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Indikator tersebut yaitu : (1) Persentase Utilitas UPI yang Meningkatkan (100,49%), (2) RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan (106,67%), (3) Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)/Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (114,06%), (4) Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (100,38), (5) Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (>120%), (6) *Chest freezer* yang Disediakan (101,67%), (7) Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan (100,32%), (8) Nilai Minimal yang Diperyaratkan Untuk Pembangunan Unit Kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (112,04), (9) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (122,27%), (10) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (125,8%), (11) Indeks Profesionalitas ASN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (110,75%), (12) Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (107,20%), (13) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (133,33%), (14) Presentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (144,92%), (15) Persentase Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (104,81%), (16) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (102,83%).

Tahun 2023 pagu anggaran awal Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu adalah sebesar Rp57.470.745,00. Menindaklanjuti Surat dari Kementerian Keuangan Nomor B.1632/MEN-KP/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari Automatic Adjustment (AA) Belanja KKP TA 2023, sehingga pagu anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu juga terdampak AA menjadi Rp47.492.040.000,00. Realisasi pagu anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dari pagu setelah AA adalah sebesar Rp47.288.908.554,00 atau setara dengan 99,57%.



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Tugas dan Fungsi .....	2
1.4. Permasalahan Utama .....	4
1.5. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
2.1. Rencana Strategis.....	8
2.2. Sasaran Kegiatan.....	8
2.3. Kebijakan.....	9
2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2023 .....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1. Capaian Kinerja.....	15
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja .....	18
3.2.1 Sasaran Kegiatan 1. Utilitas UPI yang Meningkatkan.....	18
3.2.1.1 Indikator Kinerja 1 .....	18
Persentase Utilitas UPI Yang Meningkatkan (%).....	18
3.2.2 Sasaran Kegiatan 2. Tersedianya Rancangan RSNi Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan.....	27
3.2.2.1 Indikator Kinerja 2.....	27
RSNi Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan (Produk) .....	27
3.2.3 Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Sertifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan .....	31
3.2.3.1 Indikator Kinerja 3.....	31
Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk) .....	31

3.2.4 Sasaran Kegiatan 4. Tersedianya Layanan Data Dan Informasi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan.....	36
3.2.4.1 Indikator Kinerja 4.....	36
Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan ( <i>Losses</i> ) (Data) ....	36
3.2.5 Sasaran Kegiatan 5. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan.....	39
3.2.5.1 Indikator Kinerja 5.....	39
Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit).....	39
3.2.6 Sasaran Kegiatan 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan.....	43
3.2.6.1 Indikator Kinerja 6.....	43
Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang) .....	43
3.2.7 Sasaran Kegiatan 7. Meningkatkan Nilai Tukar Hasil Pengolahan .....	45
3.2.7.1 Indikator Kinerja 7.....	45
Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%).....	45
3.2.8 Sasaran Kegiatan 8. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan.....	51
3.2.8.1 Indikator Kinerja 8.....	51
Pabrik Es Yang Dibangun (Unit) .....	51
3.2.9 Sasaran Kegiatan 9. Tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan.....	54
3.2.9.1 Indikator Kinerja 9.....	54
<i>Chest Freezer</i> Yang Disediakan (Unit).....	54
3.2.9.2 Indikator Kinerja 10 .....	57
Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit).....	57
3.2.9.3 Indikator Kinerja 11 .....	62
Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit) .....	62
3.2.10 Sasaran Kegiatan 10. Terlaksananya Pembinaan Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan .....	66
3.2.10.1 Indikator Kinerja 12.....	66
Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM).....	66
3.2.10.2 Indikator Kinerja 13.....	72
Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM) .....	72
3.2.10.3 Indikator Kinerja 14.....	75
UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina (Industri) .....	75
3.2.11 Sasaran Kegiatan 11. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu.....	81



3.2.11.1 Indikator Kinerja 15.....	81
Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai) .....	81
3.2.11.2 Indikator Kinerja 16.....	85
Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks).....	85
3.2.11.3 Indikator Kinerja 17.....	90
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai) .....	90
3.2.11.4 Indikator Kinerja 18.....	93
Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	93
3.2.11.5 Indikator Kinerja 19.....	95
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	95
3.2.11.6 Indikator Kinerja 20.....	97
Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi) .....	97
3.2.11.7 Indikator Kinerja 21.....	100
Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%) .....	100
3.2.11.8 Indikator Kinerja 22.....	102
Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	102
3.2.11.9 Indikator Kinerja 23.....	107
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	107
3.2.11.10 Indikator Kinerja 24 .....	109
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	109
3.2.11.11 Indikator Kinerja 25 .....	112
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%).....	112
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>115</b>
4.1. Kesimpulan .....	115
4.2. Permasalahan .....	115
4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut .....	116
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>117</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023 .....	12
Tabel 2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat PBM Tahun 2023.....	16
Table 3 Target dan Realisasi Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan.....	19
Table 4 Target dan Realisasi RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Dirumuskan.....	28
Table 5 Target dan Realisasi Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP) .....	32
Table 6 Target dan Realisasi Data Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan .....	38
Table 7 Target dan Realisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu .....	40
Table 8 Target dan Realisasi Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan .....	44
Table 9 Target dan Realisasi Persentase Kenaikan Nilai NTPHP .....	47
Table 10 Target dan Realisasi Pabrik Es Yang Dibangun .....	52
Table 11 Target dan Realisasi <i>Chest Freezer</i> Yang Disediakan .....	55
Table 12 Target dan Realisasi Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan.....	58
Table 13 Target dan Realisasi Sarana Pasca Panen Yang Disediakan.....	63
Table 14 Target dan Realisasi Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan.....	68
Table 15 Target dan Realisasi Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk.....	73
Table 16 Target dan Realisasi UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina.....	76
Table 17 Target dan Realisasi Nilai Minimal Yang Diperyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu .....	83
Table 18 Formulasi Penilaian terhadap Tingkat Pendidikan .....	86
Table 19 Formulasi Penilaian terhadap Kompetensi .....	86
Table 20 Formulasi Pengukuran Tingkat Kinerja.....	87
Table 21 Formulasi Pengukuran Terkait Disiplin.....	87
Table 22 Kategori Penilaian IPASN .....	89



Table 23 Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu .....	89
Table 24 Kategori Penilaian Mandiri SAKIP.....	91
Table 25 Target dan Realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu .....	91
Table 26 Target dan Realisasi Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu .....	94
Table 27 Target dan Realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu .....	96
Table 29 Target dan Realisasi Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar .....	101
Table 30 Target dan Realisasi Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu .....	103
Table 31 Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu per Indikator Kinerja .....	104
Table 32 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu.....	108
Table 33 Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu .....	111
Table 34 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu .....	113

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 2 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 .....	7
Gambar 3 Persiapan Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan ...	24
Gambar 4 Pembahasan Pedoman Pendataan Utilitas dan VPO UPI MB .....	24
Gambar 5 Refreshment Konseptor dan Editor RSNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Nonpangan Tahun 2023 .....	23
Gambar 6 Pelaksanaan Gerai SKP di Bintan-Kepri (Kiri) dan di Kabupaten Kebumen-Jawa Tengah (Kanan) .....	30
Gambar 7 Pelaksanaan Workshop NTPHP.....	38
Gambar 8 Kuesioner Survey, Rompi Survey dan Name Tag tim Daerah...	
Gambar 9 Tangkapan Layar Aplikasi NTPHP pada Server KKP.....	
Gambar 10 Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah dan Pembinaan UPI terkait Diversifikasi Produk.....	54
Gambar 11 Bimbingan Teknis Higiene Pangan Codex Bagi Unit Penanganan dan Pengolahan Ikan Skala Menengah dan Besar di Jawa Barat .....	58
Gambar 12 Bimbingan Teknis CXC 1 – 1969 Codex General Principle of Food Hygiene Including Waste Management di Bali .....	58
Gambar 13 Koordinasi pemanfaatan bantuan pemerintah berupa ICS.	58
Gambar 14 Sosialisasi dan Gerai Konsultasi Sertifikat GMP/SSOP.....	76



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu merupakan direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Dirjen PDSPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020 - 2024 yang pelaksanaannya dalam kurun waktu periode lima tahunan. Mendukung Rencana Strategis Ditjen PDSPKP tahun 2020 - 2024 tersebut, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu menyusun Renstra 2020-2024 dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Volume Produk Olahan (VPO) hasil perikanan bernilai tambah sebesar 7,3 juta ton pada tahun 2023.

Berdasar pada Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas



dari mandat yang diemban. Upaya mewujudkan akuntabilitas organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Menyusun laporan Kinerja baik secara periodik triwulan maupun tahunan.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan pada indikator sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu akan menyampaikan capaian realisasi kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 dengan menyusun **“Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023”**.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2023 adalah:

1. Untuk melaporkan pertanggungjawaban kinerja kepada pemerintah dan publik,
2. Sarana evaluasi atas capaian kinerja dalam melaksanakan visi dan misinya, serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

## **1.3. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan pembinaan mutu meliputi standardisasi, industri skala

mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan.

Sebagai upaya dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan dan pengolahan, pembinaan mutu, standardisasi, industri skala mikro, kecil, menengah, dan besar, serta diversifikasi hasil kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 7 Tim Kerja, sebagai berikut :

- a. Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar;
- b. Tim Kerja Pengembangan Layanan Kelayakan Pengolahan;
- c. Tim Kerja Prasarana dan Sarana Penanganan dan Pengolahan;



- d. Tim Kerja Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah;
- e. Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Menengah dan Besar;
- f. Tim Kerja Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Mikro dan Kecil;
- g. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

Bagan organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

Jumlah pegawai di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada Tahun 2023 berjumlah 69 orang dengan komposisi 51 orang PNS, 11 orang PPPK, dan 7 orang Non ASN. Jumlah komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Pria sebanyak 31 orang dan Wanita sebanyak 38 orang. Berdasarkan jenjang pendidikan jumlah PNS S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 29 orang, S1/D4 sebanyak 32 orang, D3 sebanyak 6 orang, SLTA sebanyak 1 orang. Sedangkan berdasarkan jenjang pangkat/golongan ruang, jumlah Golongan IV/d sebanyak 1 orang, IV/c sebanyak 1 orang, IV/b sebanyak 3 orang, Gol ruang IV/a sebanyak 14 orang, Gol III sebanyak 29 orang dan Gol II sebanyak 3 orang, Non golongan ada 18 orang.

#### 1.4. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan kelautan dan perikanan, khususnya terkait pengolahan dan pembinaan mutu produk perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan

tantangan tersebut berkaitan dengan pemanfaatan potensi yang dimiliki dalam rangka memenuhi permintaan global yang terus meningkat terhadap produk ikan, dan permasalahan sektor riil yang dihadapi stakeholders/pelaku usaha kelautan dan perikanan. Berkenaan dengan hal itu, perlu dilakukan berbagai upaya seperti : penanganan pasca panen, jaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan, diversifikasi produk, pengembangan sarana dan prasarana.

Di saat yang sama, permasalahan berusaha yang dihadapi pelaku usaha mikro-kecil, usaha menengah besar kelautan dan perikanan, serta tantangan lingkungan sekitarnya harus menjadi perhatian dan diselesaikan. Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan di Indonesia diantaranya pengetahuan para pelaku usaha mikro-kecil tentang standar mutu yang masih rendah, penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, serta klusterisasi usaha skala mikro kecil yang belum berjalan baik. Akibatnya, pelaku usaha mikro-kecil kelautan dan perikanan sering berjalan sendiri tanpa terdeteksi dan mengembangkan usaha dan mutu produk dengan kemampuan terbatas yang dimiliki. Permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perijinan juga banyak dihadapi pelaku usaha mikro-kecil kelautan dan perikanan di hampir semua wilayah. Dalam hal pengembangan pasar, masih minim pembinaan, padahal dari segi jumlah pelaku aktif sangat potensial untuk menghasilkan produk UKM kapasitas ekspor. Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD) serta minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait standar teknis mutu produk kelautan dan perikanan (GMP, SSOP, HACCP, *traceability*) menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk ekspor UMKM kelautan dan perikanan.

Usaha pengolahan skala menengah besar juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleks. Dalam hal peningkatan

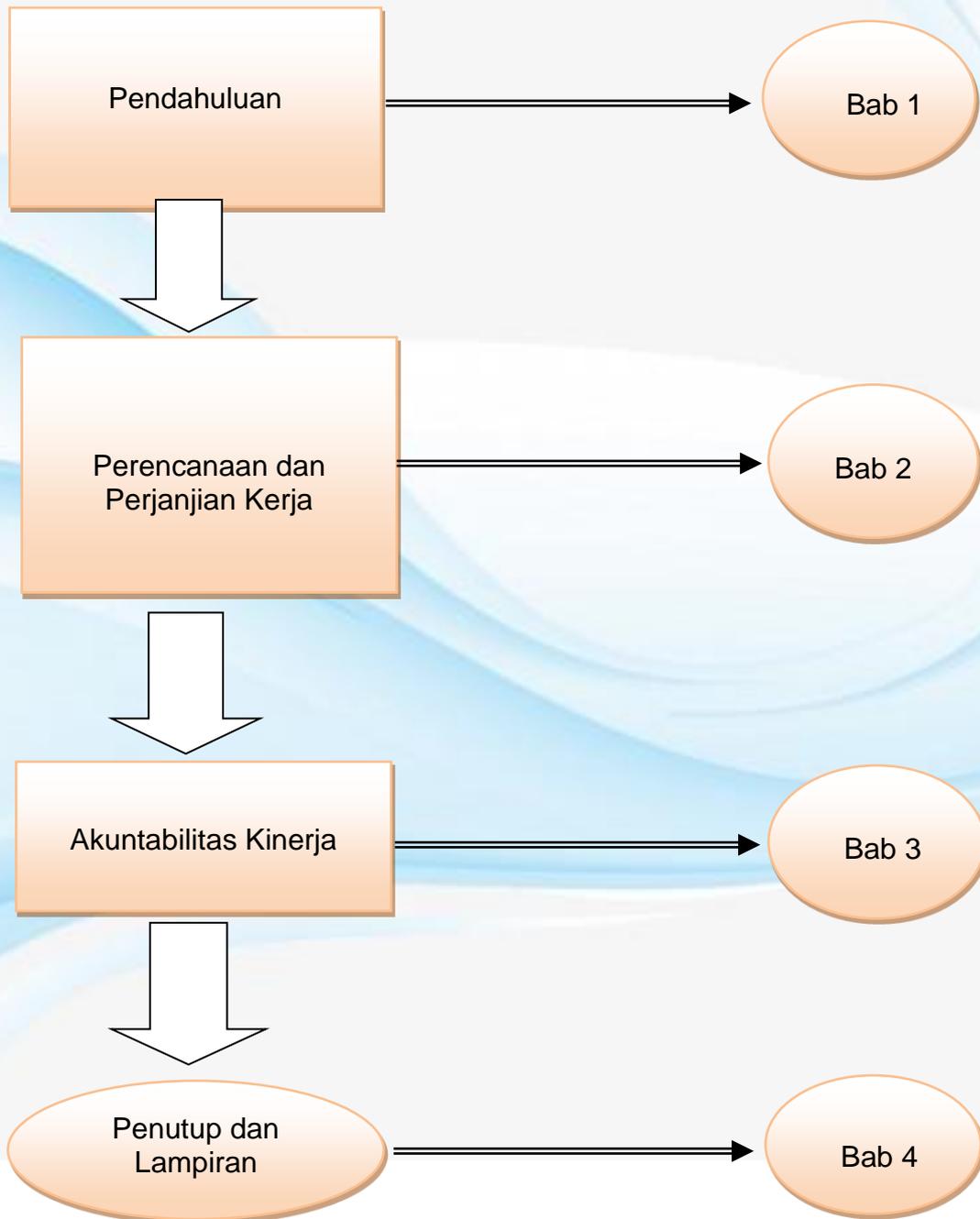


kapasitas usaha, pelaku usaha pengolahan skala menengah besar masih dihadapkan dengan permasalahan utilitas rendah, kompetisi pemenuhan bahan baku, fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang terintegrasi, dan revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar, terutama yang sifatnya kontinyu. Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin. Dari sisi pengembangan mutu, usaha pengolahan skala menengah besar banyak yang belum sepenuhnya mengolah ikan tersertifikasi, belum terfasilitasi penerbitan standar teknis mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*), dan belum memiliki sertifikat lingkungan.

### **1.5. Sistematika Penyajian**

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen informasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selama Tahun 2023. Pencapaian Kinerja (Performance Results) Tahun 2023 yang terealisasi dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance Plan) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan identifikasi sejumlah kesenjangan kinerja (Performance Gap) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023 diilustrasikan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2 Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. Rencana Strategis**

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2020-2024. Rencana strategis merupakan arah organisasi dan seluruh pegawai di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis yang disusun berlandaskan pada visi yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu :

**“Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”**

Sedangkan Misi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:

1. Peningkatan kontribusi ekonomi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap perekonomian nasional melalui Peningkatan mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Peningkatan tata Kelola pemerintahan di KKP melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

### **2.2. Sasaran Kegiatan**

Sasaran strategis dalam rencana pembangunan jangka panjang Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu 2020 – 2024 telah ditetapkan sebanyak 11 (sebelas) sasaran strategis. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan

alokasi sumberdaya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Adapun sebelas sasaran strategis tersebut yaitu :

- a. Sasaran Strategis 1. Utilitas UPI yang meningkat
- b. Sasaran Strategis 2. Tersedianya rancangan RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan
- c. Sasaran Strategis 3. Terlaksananya sertifikasi produk kelautan dan perikanan
- d. Sasaran Strategis 4. Tersedianya layanan data dan informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- e. Sasaran Strategis 5. Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan
- f. Sasaran Strategis 6. Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- g. Sasaran Strategis 7. Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan
- h. Sasaran Strategis 8 Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan
- i. Sasaran Strategis 9. Tersedianya bantuan peralatan/ sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan
- j. Sasaran Strategis 10. Terlaksananya pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan
- k. Sasaran Strategis 11. Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu

### **2.3. Kebijakan**

Salah satu arah kebijakan dan strategi Ditjen PDSPKP yang diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan tahun 2020-2024, yaitu “Meningkatkan Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Yang Bemutu, Aman dan Berdaya Saing”. Sebagai upaya mendukung kebijakan dan strategi Ditjen PDSPKP



tersebut, maka Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu telah menetapkan kebijakan yang sejalan, meliputi:

1. Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)
2. RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk)
3. Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat good manufacturing practices (GMP) (Produk)
4. Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (losses dan utilitas) (Data)
5. Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu (Unit)
6. Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)
7. Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)
8. Pabrik es yang dibangun (Unit)
9. *Chest freezer* yang disediakan (Unit)
10. Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)
11. Sarana pasca panen yang disediakan (Unit)
12. Unit penanganan dan unit Pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)
13. Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)
14. UPI skala menengah dan besar yang dibina (Industri)
15. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)
16. Indeks profesionalitas ASN dilingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)

17. Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)
18. Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
19. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)
21. Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)
22. Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
23. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
24. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)
25. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)

#### **2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2023**

Penetapan kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Penetapan kinerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.



Target kinerja ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (*input, output, dan outcome*). Rencana kinerja yang ditetapkan pada setiap tahun merupakan rumusan yang direncanakan berdasarkan rencana strategis untuk kurun waktu 2020-2024. Uraian indikator kinerja yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Table 1 Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Utilitas UPI yang meningkat	1.	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68
2.	Tersedianya rancangan RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan	2.	RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk)	15
3.	Terlaksananya sertifikasi produk kelautan dan perikanan	3.	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat <i>good manufacturing practices</i> (GMP) (Produk)	5.000
4.	Tersedianya layanan data dan informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	4.	Data profiling industri pengolahan hasil perikanan ( <i>losses</i> dan utilitas) (Data)	2
5.	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	5.	Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu (Unit)	2
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)	27.560
7.	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7.	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25
8.	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	8.	Pabrik es yang dibangun (Unit)	3
9.	Tersedianya bantuan peralatan/ sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan	9.	<i>Chest freezer</i> yang disediakan (Unit)	300
		10.	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	315
		11.	Sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	9

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
10.	Terlaksananya pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	12.	Unit penanganan dan unit Pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.800
		13.	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875
		14.	UPI skala menengah dan besar yang dibina (Industri)	1070
10.	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	15.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	75
		16.	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	83,5
		17.	Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	80,5
		18.	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	100
		19.	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	75
		20.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1
		21.	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	92
		22.	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95
		23.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan	77,5

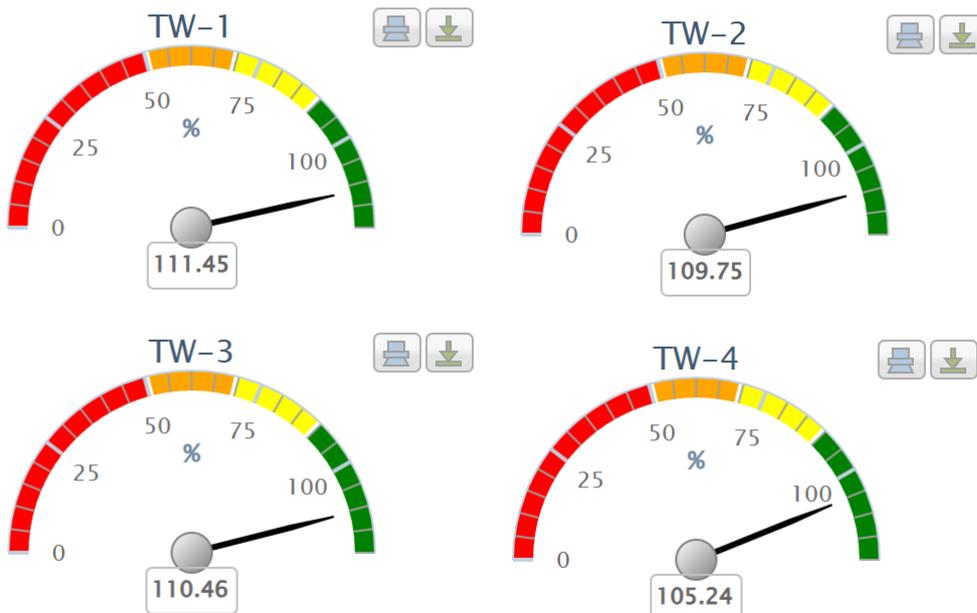


SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
			Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	
		<b>24.</b>	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5
		<b>25.</b>	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja

Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu memiliki 25 indikator kinerja yang terdiri dari 18 indikator kinerja bersifat tahunan, 1 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 6 indikator kinerja bersifat triwulanan. Capaian kinerja Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu sampai dengan Desember 2023. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu sampai dengan TW IV 2023 adalah sebesar 105,24. Capaian ini jika dibandingkan dengan capaian Triwulan IV Tahun 2022 (108,80) turun sebesar 3,56 poin atau sebesar 3,27%. Namun demikian capaian pada TW IV termasuk kategori Hijau atau predikat Baik. Penurunan ini disebabkan karena terdapat indikator kinerja yang capaiannya sudah terdapat pada triwulan sebelumnya, dikarenakan bersifat triwulanan sehingga menunjukkan bahwa adanya efisiensi waktu pelaksanaan pekerjaan dari penetapan target awal per Triwulan.



Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	



Pengukuran capaian kinerja Direktorat PBM 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif.

Tabel 2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat PBM Tahun 2023

No	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi	%Terhadap Target	
		TAHUN 2023	TW 4		TAHUN 2023	TW 4
1	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68	68	68,33	100,49	100,49
2	RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk)	15	15	16	106,67	106,67
3	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat good manufacturing practices (GMP) (Produk)	5000	5000	5703	114,06	114,06
4	Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (losses) (Data)	2	2	2	100	100
5	Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu (Unit)	2	2	2	100	100
6	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)	27.560	27.560	27.664	100,38	100,38
7	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25	0,25	0,66	264	264
8	Pabrik es yang dibangun (Unit)	3	3	3	100	100
9	Chest freezer yang disediakan (Unit)	300	300	305	101,67	101,67
10	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	315	315	316	100,32	100,32
11	Sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	9	9	9	100	100

No	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi	%Terhadap Target	
		TAHUN 2023	TW 4		TAHUN 2023	TW 4
12	Unit penanganan dan unit Pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.800	490	1.800	100	100
13	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875	250	875	100	100
14	UPI skala menengah dan besar yang dibina (Industri)	1070	185	1070	100	100
15	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	75	75	84,03	112,04	112,04
16	Indeks profesionalitas ASN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	83,2	83,2	92,14	110,75	110,75
17	Nilai penilaian mandiri SAKIP di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	80,5	80,5	86,30	107,20	107,20
18	Batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	100	100	100	100	100
19	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	75	75	100	133,33%	133,33%



No	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi	%Terhadap Target	
		TAHUN 2023	TW 4		TAHUN 2023	TW 4
20	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1	1	1	100	100
21	Persentase unit kerja di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang menerapkan manajemen pengetahuan terstandar (%)	92	92	133,33	144,92%	144,92%
22	Persentase realisasi anggaran di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95	95	99,57	104,81	104,81
23	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5	77,5	79,69	102,83	102,83
24	Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5	77,5	94,76	122,27	122,27
25	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5	77,5	97,5	125,81	125,81

## 3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

### 3.2.1 Sasaran Kegiatan 1. Utilitas UPI yang Meningkatkan

#### 3.2.1.1 Indikator Kinerja 1

##### **Persentase Utilitas UPI Yang Meningkatkan (%)**

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan kedua sebagai penyangga atau buffer bagi ketersediaan produk perikanan.

Permintaan bahan baku usaha pengolahan ikan mempunyai peran menstabilkan harga ikan, baik dari kegiatan penangkapan maupun budidaya, serta mampu menampung produksi terutama pada musim produksi ikan melimpah. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan oleh terintegrasikan kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan. Jenis kegiatan usaha pengolahan hasil perikanan dibagi menjadi 13 yaitu : (1) Pendinginan/Pengesan ikan, (2) Pembekuan ikan, (3) Penggaraman/Pengeringan ikan, (4) Pemindangan ikan, (5) Pengasapan/Pemanggangan ikan, (6) Peragian/Fermentasi ikan, (7) Pengalengan ikan, (8) Pengolahan Berbasis Lumatan Daging Ikan/Jelly Ikan atau Surimi, (9) Pengolahan Kerupuk Ikan, Kripik, Peyek Ikan, (10) Pembuatan Minyak ikan, (11) Pengolahan Rumput Laut, (12) Pengolahan Lainnya dan (13) Penanganan ikan.

Table 3 Target dan Realisasi Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) (%)	68	68	68	68,33	68,33	100,49%	100,49%	100,49%

Tahun 2023 persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) ditargetkan sebesar 68. Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga capaiannya dapat diketahui pada Triwulan IV, yaitu 68,33 atau setara dengan 100,49% dari target. Jika dibandingkan dengan target renstra jangka menengah 2020-2024, capaian realisasi tahun 2023 telah melebihi target sebesar 0,48%. Indikator kinerja persentase utilitas UPI pada tahun 2022 terealisasi sebesar 67, maka realisasi pada tahun 2023



mengalami kenaikan sebesar 1,98%. Pertumbuhan capaian realisasi indikator kinerja Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 1,63%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan sebesar Rp420.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp419.949.700,00 atau sebesar 99,99% dari alokasi anggaran. Indikator kinerja persentase utilitas UPI terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran yaitu dapat terlihat dari persentase capaian realisasi indikator kinerja (100,49%) yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran (99,99%).

Direktorat Pengolah dan Bina Mutu telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Telah dilakukan penghitungan VPO semester I pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan tujuan untuk melakukan cleansing data VPO khusus unit pengolahan ikan skala menengah dan besar tahun 2023 yang bersumber dari data lalu lintas ekspor dan domestik keluar. *Cleansing* akan dilakukan dari periode bulan januari sampai dengan juni 2023 atas seluruh data VPO dari sampel UPI yang sudah diinput pada *google form* untuk 13 jenis kegiatan pengolahan dan penanganan. *Cleansing* dilakukan atas 13 jenis kegiatan pengolahan dan penanganan dan produknya yang sudah diinput pada *google form* dari bulan januari-juni 2023;
- b. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Data Utilitas dan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Menengah dan Besar Semester 1 Tahun 2023 pada tanggal 11 Oktober 2023. Tujuan rapat adalah untuk menyelesaikan penginputan kuisisioner data sarana prasarana, kapasitas terpasang, volume produk olahan dan kinerja UPI Menengah dan Besar oleh 36 Enumerator di 34 Provinsi serta melakukan koordinasi guna percepatan pendataan dan

penghitungan utilitas dan VPO UPI MB semester 2 tahun 2023. Selain itu juga tetap dilakukan sosialisasi dan asistensi kepada para pelaku usaha dan Enumerator tentang cara penginputan data sarana prasarana, kapasitas terpasang, dan volume produksi olahan dan kinerja UPI MB di 34 Provinsi dengan populasi UPI terbanyak yaitu Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Riau;

- c. Dalam rangka penghitungan utilitas dan VPO UPI menengah dan besar tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan rapat pembahasan volume produk olahan UPI menengah besar triwulan 3 tahun 2023 pada tanggal 6 November 2023. Rapat membahas tentang ketersediaan *raw data* ekspor dan domestik keluar hasil perikanan tahun 2023 yang digunakan dalam perhitungan VPO UPI menengah dan besar. Hal tersebut berhubungan dengan terbentuknya Badan Karantina Indonesia yang menjadikan Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) yang bernaung dibawah KKP harus melebur ke dalam organisasi baru tersebut dan KKP membentuk unit kerja baru yaitu Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP). Beberapa hal yang perlu dibahas adalah ketersediaan *raw data* ekspor dan domestik keluar hasil perikanan, yang mana data tersebut menggunakan aplikasi *sister caroline*. Tahun 2024 operasional *sister caroline* kemungkinan akan dipindahkan ke Badan Karantina Indonesia. BPPMHKP kemungkinan akan membuat sistem aplikasi baru pengganti *sister caroline*. Terkait kebutuhan data untuk perhitungan VPO UPI Menengah dan Besar, Direktorat PBM akan terus berkoordinasi dengan BPPMHKP agar dalam aplikasi yang akan dibangun diklasifikasikan ke dalam 13 jenis kegiatan pengolahan, dan dimasukkan tentang peruntukan produk, NIB, dan



- asal pengolahan (kota UPI pengolahan) tidak dituliskan *free text*. Terkait *raw data* ekspor dan domestik keluar tahun 2023 periode Januari sd Desember 2023 masih bisa diperoleh (tersedia);
- d. Telah dilakukan *cleansing* data lalu lintas ekspor dan domestik keluar bulan Juli s.d. Oktober 2023 pada tanggal 29 November 2023. Pengelompokan data dibagi berdasarkan 13 jenis kegiatan pengolahan sesuai dengan Kepmen KP No 119 Tahun 2021 tentang Data Induk Produk Kelautan dan Perikanan, yaitu : (1) Pendinginan/pengesan ikan; (2) Pembekuan ikan; (3) Penggaraman/pengeringan ikan; (4) Pemindangan ikan; (5) Pengasapan/pemanggang ikan; (6) Peragian/fermentasi ikan; (7) Pengalengan ikan; (8) Pengolahan berbasis lumatan daging ikan/*jelly* ikan atau surimi; (9) Pengolahan kerupuk ikan, kripik, peyek ikan; (10) Pembuatan minyak ikan; (11) Pengolahan rumput laut; (12) Pengolahan lainnya; dan (13) Penanganan ikan.
- e. Telah dilakukan pembahasan perhitungan sementara VPO Menengah dan Besar periode bulan Januari s.d. Oktober Tahun 2023 dilaksanakan tanggal 30 November 2023. Perhitungan VPO dan kebutuhan bahan baku UPI menengah besar dilakukan untuk periode Januari sampai Oktober 2023, meliputi produk konsumsi dan non konsumsi kecuali benih ikan, induk ikan, ikan hias, pakan ikan, cangkang ikan, artemia, coral dan lainnya. Dari kegiatan ini telah didapatkan hasil perhitungan sementara VPO bulan Januari s.d. Oktober 2023 dari data ekspor hasil *cleansing*.
- f. Telah dilaksanakan perhitungan utilitas dan volume produk olahan UPI menengah dan besar pada tanggal 18 Desember 2023. Rapat bertujuan untuk melakukan penghitungan hasil *cleansing* data lalu lintas BKIPM ekspor maupun domestik hingga bulan November, menghitung nilai utilitas berdasarkan data kapasitas dan produksi yang masuk dari data yang disampel oleh enumerator provinsi,

hingga melakukan analisis sederhana dari hasil penghitungan yang diperoleh. Dari rapat tersebut didapatkan bahwa total UPI sampel yang masuk s.d November 2023 sebanyak 293 sampel. Selain itu juga telah dihitung proporsi dari jenis pengolahan dan perhitungan utilitas sementara. Selanjutnya perlu dilakukan validasi data untuk UPI dengan utilitas diatas 150% dan dibawah 40%, baik untuk cara penghitungan kapasitas sarana prasarana yang dimiliki atau kelengkapan data yang masih kurang. Dari hasil penghitungan diperoleh hasil bahwa nilai utilitas setiap bulannya mengalami fluktuasi, hal itu dikarenakan volume produksi dari setiap jenis kegiatan olahan juga mengalami perubahan, namun setelah dihitung secara rata-rata proporsi utilitas unit pengolahan ikan skala menengah besar tahun ini mengalami kenaikan.

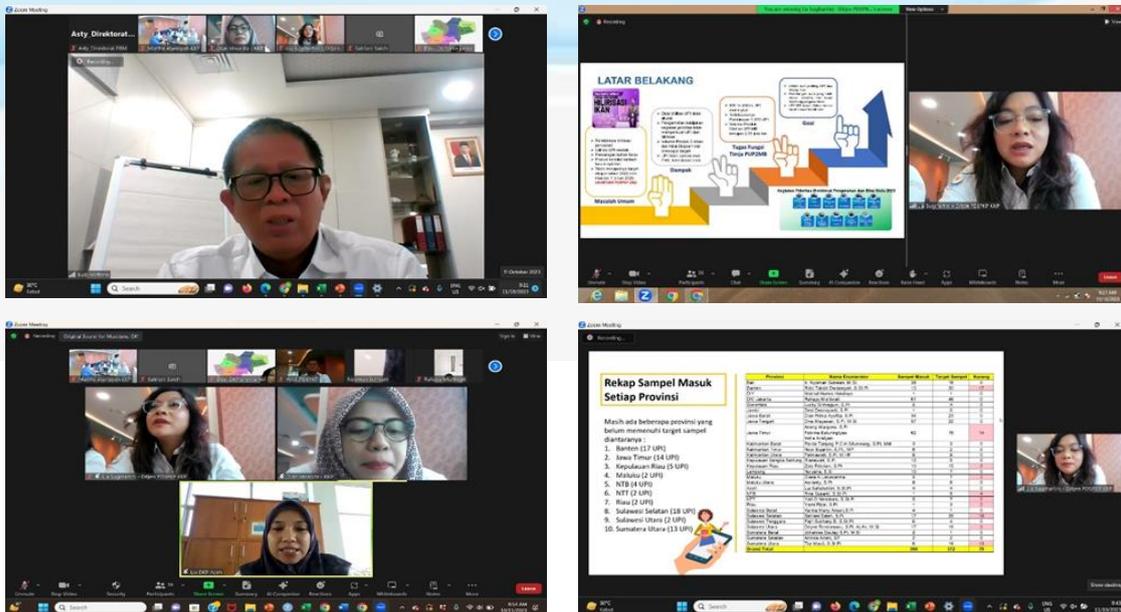
- g. Tim VPO Pusat melaksanakan pertemuan dengan enumerator pada tanggal 19 Desember 2023 untuk melakukan evaluasi hasil penginputan hingga akhir bulan November. Dari hasil penginputan sudah terdapat 347 UPI sampel yang sudah masuk dengan rincian sesuai pada tabel berikut. Dari rekap yang sudah masuk, masih terdapat 3 provinsi yang belum melakukan input data, yaitu provinsi Papua, Papua Barat dan Sulawesi Tengah. Pada pertemuan Tim VPO meminta untuk provinsi yang belum melakukan input agar dapat segera mengisi data kapasitas terpasang dan saran prasaran untuk penghitungan utilitas UPI MB. Selain itu masih ada jenis kegiatan olahan yang sampelnya belum masuk yaitu Pembuatan Minyak Ikan, dimana sampel jenis kegiatan olahan tersebut terdapat di provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat.

Dokumentasi kegiatan tertera pada gambar berikut :





Gambar 3 *Cleansing* data VPO khusus unit pengolahan ikan skala menengah dan besar tahun 2023 tanggal 3 Oktober 2023



Gambar 4 Rapat Koordinasi Data Utilitas dan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Menengah dan Besar Semester 1 Tahun 2023 pada tanggal 11 Oktober 2023



Gambar 5 pembahasan volume produk olahan UPI menengah besar triwulan 3 tahun 2023 pada tanggal 6 November 2023



Gambar 6 Penyusunan Pedoman Penghitungan Utilitas UPI Menengah dan Besar





Gambar 7. Pembahasan perhitungan sementara VPO Menengah dan Besar periode bulan Januari s.d. Oktober Tahun 2023 tanggal 30 November 2023



Gambar 8. Perhitungan utilitas dan volume produk olahan UPI menengah dan besar pada tanggal 18 Desember 2023

### **3.2.2 Sasaran Kegiatan 2. Tersedianya Rancangan RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan**

#### **3.2.2.1 Indikator Kinerja 2**

##### **RSNI Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Dirumuskan (Produk)**

Rekomendasi RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan rekomendasi kebijakan dalam bentuk rancangan standar yang dirumuskan dan disusun oleh Komite Teknis (Komtek) sesuai dengan ruang lingkup dalam *International Classification for Standards* (ICS). Komtek tersebut dibentuk oleh Instansi Teknis Pengampu yang dalam hal ini dapat berasal dari K/L atau organisasi masyarakat.

Instansi teknis tersebut salah satunya adalah Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang membentuk dan mengelola Keanggotaan dan Kesekretariatan Komtek 65-05 Produk Perikanan dan Komtek 65-08 Produk Perikanan Nonpangan. Kedua Komtek tersebut memiliki tugas dalam perumusan dan penyusunan SNI produk perikanan dan produk perikanan nonpangan.

Perubahan dalam perdagangan internasional telah mengarah pada kebutuhan akan standar dan penilaian kesesuaian yang diterima secara global. Sehingga perumusan rancangan SNI produk hasil kelautan dan perikanan menjadi hal yang harus dilakukan, dengan tujuan :

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup;
2. Membantu kelancaran perdagangan dan persaingan usaha yang sehat;
3. Peningkatan mutu dan daya saing industri dalam negeri.



Tahap penyusunan SNI dimulai dengan Penyusunan Konsep (Perumusan RSNI1), Rapat Teknis (Perumusan RSNI2) dan Rapat Konsensus (Perumusan RSNI3), kemudian tahap jajak pendapat (*e-balloting*) dan jajak pendapat ulang (apabila diperlukan) yang dilakukan di *website* SISPK BSN, dan penetapan SNI oleh BSN.

Table 4 Target dan Realisasi RSNI Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Yang Dirumuskan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk)	15	15	15	16	16	106,67%	106,67%	106,67%

Tahun 2023 RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan ditargetkan sebesar 15. Indikator kinerja ini bersifat tahunan, sehingga capaiannya dapat diketahui pada Triwulan IV, yaitu 16 atau setara dengan 106,67% dari target. Jika dibandingkan dengan target renstra jangka menengah 2020-2024, capaian realisasi tahun 2023 telah melebihi target sebesar 6,67%. Indikator kinerja RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 20, maka realisasi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 20%. Capaian realisasi indikator kinerja RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 secara rata-rata tidak mengalami

pertumbuhan atau *stagnan*, dikarenakan capaian realisasi pada tahun 2023 sama dengan capaian realisasi tahun 2018.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan sebesar Rp500.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp 499.924.600,00 atau sebesar 99,98% dari alokasi anggaran. Indikator kinerja RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran yaitu dapat terlihat dari persentase capaian realisasi indikator kinerja (106,67%) yang lebih besar daripada persentase realisasi anggaran (99,98%).

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja RSNI Produk Hasil KP yang Dirumuskan pada Triwulan IV sebagai tindak lanjut dari rekomendasi kegiatan pada Triwulan III antara lain:

1. Berkoordinasi dalam melakukan Kaji ulang SNI Produk Perikanan dan Produk Perikanan Non Pangan bersama Komite Teknis dan tenaga ahli;
2. Berkoordinasi dengan Komite Teknis 65-05, Komite Teknis 65-08 dan Badan Standardisasi Nasional dalam rangka Penetapan RSNI menjadi SNI;
3. Melakukan verifikasi hasil jajak pendapat mengenai acuan RSNI produk Perikanan Perikanan Non Pangan bersama Badan Standardisasi Nasional dan Komite Teknis (<https://drive.google.com/drive/folders/1u2jD0AyaqVV2HVCswm8GtRQxYqQzLiN-q?usp=sharing>).

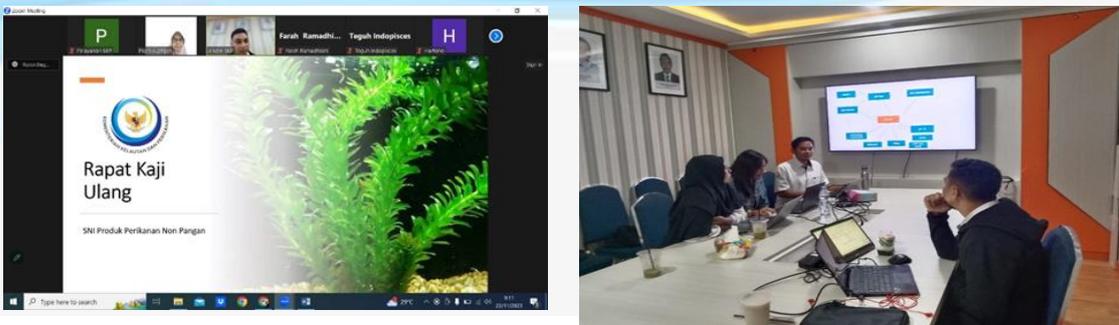
Kendala yang dihadapi pada Triwulan IV untuk pencapaian RSNI Produk Hasil KP yang Dirumuskan yakni perlunya peran aktif pengguna



SNI dalam memberikan feedback terhadap kesesuaian SNI yang telah disusun.



Gambar 9 Rapat Kaji ulang SNI Produk Perikanan



Gambar 10 Rapat Kaji Ulang Produk Perikanan Non Pangan

### 3.2.3 Sasaran Kegiatan 3. Terlaksananya Sertifikasi Produk Kelautan Dan Perikanan

#### 3.2.3.1 Indikator Kinerja 3

##### **Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) (Produk)**

Produk olahan hasil perikanan yang mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) karena unit pengolahan ikan nya telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik (GMP) dan telah memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi (SSOP).

Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP)/ Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan merupakan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Pengukuran terhadap capaian indikator ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$S_{\text{produk}} = \sum S_{\text{skep}}$$

Keterangan :

- $S_{\text{produk}}$  = Jumlah produk olahan perikanan yang mendapatkan Sertifikat GMP
- $S_{\text{skep}}$  = Jumlah Sertifikat GMP, baik perpanjangan atau baru pada tahun berjalan



Table 5 Target dan Realisasi Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP)

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP)	5000	3000	5000	5703	5703	114,06%	190,10%	114,06%

Tahun 2023 Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) ditargetkan sebesar 5000. Capaian realisasi pada Triwulan IV adalah 5.703 SKP atau setara dengan 114,06% dari target. Jika dibandingkan dengan target renstra jangka menengah 2020-2024, capaian realisasi tahun 2023 telah melebihi target sebesar 90,1%. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan target pada periode tahun 2023 sebesar 2.000 SKP atau 66,67% dari target renstra jangka menengah 2020-2024. Indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada tahun 2022 terealisasi sebesar 3.614 SKP, maka realisasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan secara kuantitas sebesar 2.089 SKP atau setara dengan 57,8%. Capaian realisasi indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good*

*Manufacturing Practices* (GMP) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 17,27%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Produk Yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp 1.999.319.000,00 atau sebesar 99,97% dari alokasi anggaran. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp681.000,00 atau sebesar 0,03% dengan capaian realisasi yang melebihi target (114,06%).

Kegiatan yang telah dilakukan terkait indikator kinerja produk yang mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi Gerai SKP;
2. Pembahasan panduan KBLI;
3. *Lounging* implementasi dan melakukan sosialisasi integrasi Aplikasi SKP Online dengan OSS;
4. Bimbingan Teknis Penerapan Kelayakan Dasar Pengolahan;
5. Pembahasan Proses Bisnis dan Roadmap Pembinaan.

Kendala pencapaian indikator kinerja Produk yang Mendapat Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) / Sertifikat *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada Triwulan IV diantaranya:

1. Masih terdapat UMKM peserta gerai yang belum menindaklanjuti saran pembinaan yang diberikan oleh Pembna Mutu sehingga Dinas KP belum dapat menerbitkan rekomendasi kelayakan pengolahan sebagai salah satu persyaratan penerbitan SKP;
2. *Stake holder* pengguna layanan SKP banyak yang belum memahami penggunaan KBLI yang sesuai dengan jenis produk yang akan diajukan untuk memperoleh SKP sehingga memperlambat proses penerbitan SKP;



3. Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis SKP yang dilaksanakan secara online tidak efektif memberikan informasi kepada peserta kegiatan;
4. Pembahasan Proses Bisnis dan *Roadmap* Pembinaan akan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi KKP yang masih dibahas di tingkat KKP.

Berkaitan dengan perubahan organisasi lingkup KKP, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu yang akan melaksanakan tugas pembinaan dalam rangka perolehan sertifikat bidang pengolahan perikanan serta upaya mengatasi kendala yang dialami, maka Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu akan melaksanakan penyediaan tenaga Pembina Mutu yang kompeten dan teregistrasi di 38 provinsi. Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode tahun berikutnya meliputi :

1. Pengembangan standar kompetensi pembina mutu;
2. Penyusunan Modul bimtek pembina mutu;
3. Sosialisasi Program Pembinaan Mutu;
4. Bimbingan Teknis TOT Pembina Mutu;
5. Bimbingan Teknis Pembina Mutu;
6. Penetapan Pembina Mutu Terdaftar;
7. Penyusunan Roadmap Pembinaan UPI.



Gambar 11 Rapat Koordinasi Penerbitan SKP/ Sertifikat GMP 18-20 September 2023, Hotel Mercure Cikini



Gambar 12 Bimtek Penerapan Kelayakan Dasar Pengolahan dengan Pembina Mutu Daerah tanggal 27-29 Oktober 2023





Gambar 13 Kegiatan *Launching* Aplikasi SKP *Online* dengan OSS tanggal 29 Oktober 2023

### 3.2.4 Sasaran Kegiatan 4. Tersedianya Layanan Data Dan Informasi Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan

#### 3.2.4.1 Indikator Kinerja 4

##### Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses*) (Data)

Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan merupakan jumlah data informasi industri pengolahan hasil perikanan yang berupa data *losses* dan utilitas yang dihasilkan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam satu periode waktu. Perolehan jumlah data industri tersebut dapat dihitung dengan rumus :

$$P = \Sigma \text{Losses} + \Sigma \text{Utilitas}$$

- Keterangan :
- P = Jumlah Data dan Informasi industri pengolahan hasil perikanan
- $\Sigma$ Losses = jumlah data dan informasi Susut Hasil Produk Perikanan
- $\Sigma$ Utilitas = jumlah data dan informasi Utilitas Pengolahan Hasil Perikanan

Kegiatan susut hasil perikanan tahun 2023 dilakukan di kabupaten/kota dengan target pengambilan data susut hasil perikanan di Kabupaten/Kota dan Pelabuhan di 39 lokasi sesuai dengan SK Dirjen No.19 Tahun 2023. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Exploratory Fish Loss Assessment Method* (EFLAM) dengan modifikasi. Sebagai acuan pengambilan data, disiapkan kuisisioner dalam bentuk *e-form* menggunakan kuisisioner yang digunakan sebelumnya dan dimodifikasi sesuai dengan *e-form* yang diharapkan. Kuisisioner yang telah disusun di ujicoba di beberapa lokasi target untuk mengupdate efektivitas kuisisioner dalam mengumpulkan data. Agar kuisisioner dapat dipahami dan secara efektif digunakan oleh enumerator maka dilakukan *workshop*/bimbingan teknis secara virtual.

Pengumpulan data primer pada kuisisioner dilakukan dengan pendekatan wawancara terhadap pelaku usaha perikanan (responden). Responden yang terdiri nelayan, pengepul/pedagang menengah, pedagang pasar dan pengolah. Susut hasil perikanan yang diidentifikasi pada responden ada dua yaitu susut mutu dan susut fisik. Secara rata-rata, nilai susut pelaku nelayan di 26 lokasi adalah 6,86% dengan nilai kerugian sekitar 67 juta rupiah/pelaku/tahun. Sedangkan rata-rata nilai total susut hasil pengepul/ pedagang menengah adalah sebesar 7,93% dengan nilai kerugian yang ditimbulkan dari total susut hasil tersebut yaitu sebesar Rp56.215.530,00/pelaku/tahun. Rata-rata nilai total susut hasil pengolah adalah sebesar 11,65% dengan nilai kerugian yang ditimbulkan dari total susut hasil tersebut yaitu sebesar Rp58.373.890,00/pelaku/tahun.

Hasil pengukuran susut tahun 2023 tidak berbeda jauh dengan hasil pengukuran tahun 2022 yaitu sebesar 7,78% dengan nilai kerugian mencapai 253 juta rupiah/pelaku/tahun. Nilai rupiah kerugian pada tahun ini sangat rendah dibanding tahun 2022 karena kerugian pada tahun ini hanya diukur untuk komoditas kembung dan TTC bukan dari hasil tangkapan keseluruhan.



Table 6 Target dan Realisasi Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (Losses dan Utilitas) (Data)	2	2	2	2	2	100,00%	100,00%	100,00%

Tahun 2023 Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses dan Utilitas*) ditargetkan sebesar 2 data. Capaian realisasi pada Triwulan IV adalah 2 data atau setara dengan 100% dari target. Jika dibandingkan dengan target renstra jangka menengah 2020-2024, capaian realisasi tahun 2023 telah memenuhi target 100%. Indikator kinerja Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses dan Utilitas*) pada tahun 2022 tidak tercantum, sehingga tidak dapat dibandingkan. Capaian realisasi indikator kinerja Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses dan Utilitas*) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 tidak ada sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan pertumbuhannya.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Data Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan (*Losses dan Utilitas*) sebesar Rp840.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp839.689.000,00 atau sebesar 99,96% dari pagu anggaran. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp311.000,00 atau sebesar 0,04% dengan capaian realisasi yang sesuai target (100%).

Kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan perhitungan susut hasil perikanan pada Triwulan IV yaitu telah dilakukan finalisasi perhitungan susut hasil produk perikanan yang terdiri dari 39 lokasi pelabuhan dengan responden nelayan, 39 Pelabuhan/PPI/Tempat Pelelangan Ikan dengan responden pedagang menengah/pedagang pengepul, 39 lokasi pasar umum/pasar ikan dengan responden pedagang kecil dan 39 lokus kab/kota dengan responden pelaku usaha pengolahan ikan.

### **3.2.5 Sasaran Kegiatan 5. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan**

#### **3.2.5.1 Indikator Kinerja 5**

##### **Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit)**

UPI bernilai tambah merupakan tempat untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan yang dilengkapi dengan sarana mesin pembeku dan gudang penyimpanan beku agar mampu menjaga mutu dan kondisi produk beku dan memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan dan meningkatkan nilai tambah produk hasil perikanan yang berdaya saing dengan tujuan pasar terutama ekspor. Selain alat utama tersebut, operasional UPI juga harus didukung dengan peralatan penunjang pengolahan, laboratorium dan peralatan penunjang administrasi dan IPAL.

Pencapaian target dilakukan dengan menghitung jumlah bangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu yang dapat dibangun dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{UPI} = \Sigma \text{UPI}$$



Keterangan :

UPI = Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu yang Dibangun

ΣUPI = Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu yang Dibangun

Table 7 Target dan Realisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu (Unit)	3	2	3	3	3	100,00%	150,00%	100,00%

Tahun 2023 Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu ditargetkan sebesar 2 unit dan 1 unit untuk mendukung program Kampung Nelayan Modern (Kalamo), sehingga target pada tahun 2023 menjadi 3 unit dengan capaian bersifat tahunan. Capaian realisasi pada Triwulan IV Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu adalah 3 unit atau setara dengan 100% dari target. Jika dibandingkan dengan target renstra jangka menengah 2020-2024,

capaian realisasi tahun 2023 telah melebihi target sebesar 50%. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan target pada periode tahun 2023. Indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu pada tahun 2022 terealisasi sebesar 1 unit, maka realisasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan secara kuantitas sebesar 2 unit atau setara dengan 200%. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan target pada tahun 2022 dikarenakan terjadinya AA dan penambahan target pada tahun 2023 karena untuk mendukung program prioritas Kalamo.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah Yang Dibangun Dalam Kawasan Perikanan Terpadu sebesar Rp6.744.608.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp6.744.558.250,00 atau sebesar 99,99% dari alokasi anggaran. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp49.750,00 atau sebesar 0,001%. dengan capaian realisasi yang sesuai target (100%).

Pada Triwulan IV, tahapan kegiatan yang telah dilakukan antara lain :

1. Melakukan Pemantauan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan UPI NT baik melalui WA Group maupun secara langsung ke lokasi pembangunan pada tanggal 18 - 23 Oktober 2023;
2. Telah dilakukan cek fisik penyelesaian pembangunan UPI pada tanggal 31 Oktober 2023 yang ditindaklanjuti dengan PHO pekerjaan pembangunan UPI pada tanggal 1 November 2023;
3. Telah dilakukan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Pagar UPI NT di Kab. Gresik melalui SPK Nomor 5507/DJPDSPKP.0/PL.420/XII/2023 pada tanggal 4 Desember 2023;



4. Telah dilakukan penyerahan UPI Bernilai Tambah di Kab. Gresik melalui BAST nomor B.7498/DJPSPKP.0/PL.740/XII/2023 tanggal 5 Desember 2023;
5. Telah dilakukan PHO Pekerjaan Pembangunan Pagar Pada tanggal 13 Desember 2023 melalui BAST PHO Nomor 5642/DJPDSPKP.0/PL.420/XII/2023;
6. Telah dilakukan penyerahan Pagar UPI Bernilai Tambah di Kab. Gresik melalui BAST nomor B.7869/DJPDSPKP.0/PL.930/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023;
7. Telah dilakukan pelatihan bagi calon operator UPI Bernilai Tambah di Kab. Gresik pada tanggal 21 Desember 2023;
8. Telah dilakukan pengadaan rumah pengering UPI mendukung Kampung Nelayan Modern melalui surat pesanan Nomor 4053/DJPDSPKP.0/PL.420/IX/2023 tanggal 29 September 2023;
9. Telah dilakukan Serah Terima Pekerjaan rumah pengering UPI Kampung Nelayan Modern pada tanggal 22 November 2023 melalui BASTHP Nomor 5359.c/DJPDSPKP.0/PL.420/XI/2023 tanggal 22 November 2023;
10. Telah dilakukan penyerahan UPI Nilai Tambah Mendukung Kampung Nelayan Modern di Pulau Pasaran, Bandar Lampung melalui BAST nomor B.8031/DJPDSPKP.0/PL.750/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023;
11. Tindak lanjut yang dilakukan dari triwulan sebelumnya (<https://drive.google.com/drive/folders/1kW6ddiW147N4-w9UNuKfLXqeSr1ujnD5?usp=sharing>) :
  - a. Telah dilakukan percepatan pekerjaan pada minggu ke-19 sehingga mengurangi deviasi yang semula -24.173 menjadi -16.284,
  - b. Telah menerbitkan Surat Peringatan Kondisi Kritis Ke-2 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan

(UPI) Bernilai Tambah di Kabupaten Gresik Nomor B.1083/DJPDSPKP.3/PDS.240/X/2023 Tanggal 2 Oktober 2024,

- c. Telah dilakukan Show Cause Meeting Kontrak Kritis Ke-3 Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Bernilai Tambah di Kabupaten Gresik pada tanggal 4 Oktober 2024 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor BA.3704/DJPDSPKP.3/PL.420/X/2023.

### **3.2.6 Sasaran Kegiatan 6. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan**

#### **3.2.6.1 Indikator Kinerja 6**

##### **Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (Orang)**

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk KP merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di bidang pengolahan dan bina mutu hasil KP. Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung tenaga kerja yang turut serta langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan bantuan pemerintah yang diberikan dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{TK = \Sigma TK PBM}$$

Keterangan :

TK = Jumlah tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan



ΣTK PBM = Jumlah orang yang melakukan pekerjaan di bidang pengolahan dan bina mutu hasil KP

Table 8 Target dan Realisasi Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan (orang) Perikanan Terpadu (Unit)	27.560	-	27.560	27.664	27.664	100,38%	-	100,38%

Tahun 2023 Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan ditargetkan sebesar 27.560 orang dengan capaian bersifat tahunan. Capaian realisasi pada Triwulan IV indikator kinerja Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan adalah 27.664 orang atau setara dengan 100,38% dari target. Indikator kinerja ini tidak tertera pada renstra jangka menengah 2020-2024 dikarenakan merupakan indikator mandatori dari target Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, oleh karena itu capaian tidak dapat dibandingkan. Indikator kinerja Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan pada tahun

2022 terealisasi sebesar 23.226 orang, maka realisasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan secara kuantitas sebesar 4.438 orang atau setara dengan 19,11%. Tidak ada pagu anggaran khusus terkait indikator kinerja Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan sehingga tidak dapat disampaikan prosentase realisasi penyerapan anggaran.

Rincian capaian realisasi indikator kinerja Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Pengolahan Dan Bina Mutu Produk Kelautan Dan Perikanan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Bantuan Pemerintah	Target		Realisasi	
		Tenaga Kerja Langsung (orang)	Tenaga Kerja Tidak Langsung (orang)	Tenaga Kerja Langsung (orang)	Tenaga Kerja Tidak Langsung (orang)
1	Pabrik Es	50	-	53	-
2	Sarana pasca panen hasil kelautan dan perikanan	20	100	20	107
3	<i>Chest Freezer</i>	10	1500	10	1525
4	Peralatan pengolahan	10	1600	10	1608
5	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan	-	24.270	-	24.331
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>90</b>	<b>27.470</b>	<b>93</b>	<b>27.571</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>27.560</b>		<b>27.664</b>

### 3.2.7 Sasaran Kegiatan 7. Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan

#### 3.2.7.1 Indikator Kinerja 7

##### Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)

Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) merupakan perbandingan indeks harga jual hasil pengolahan ikan dengan indeks



harga konsumsi rumah tangga dan indeks harga usaha pengolahan ikan. NTPHP digunakan sebagai salah satu *proxy* untuk melihat daya tukar produk olahan terhadap komoditas biaya produksi dan rumah tangga secara cepat dan *near real time*, dengan asumsi kesamaan kuantitas produksi antar waktu. Peningkatan Nilai Tukar Pengolahan dilihat dari selisih NTPHP tahun ke-t dengan tahun ke-(t-1).

NTPHP > 100, berarti pengolah mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan pengolah naik lebih besar dari pengeluarannya. NTPHP = 100, berarti pengolah mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan atau penurunan harga barang-barang yang dikonsumsi oleh PHP, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil perikanan sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan pengolah sama dengan pengeluarannya. NTPHP < 100, berarti pengolah mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan pengolah turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Sehingga jika dituliskan dalam rumus adalah sebagai berikut :

$$[NTHP]_{t=It/Ib} \times 100\%$$

$$\Delta NTPHP = [NTHP]_{t-1} - [NTHP]_{(t-1)}$$

Keterangan	:	
NTPHP <sub>t</sub>	=	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan tahun ke-t
NTPHP <sub>t-1</sub>	=	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan tahun ke-(t-1)
□NTPHP	=	Peningkatan NTPHP
I <sub>t</sub>	=	Indeks harga yang diterima PHP
I <sub>b</sub>	=	Indeks harga yang dibayar PHP

Table 9 Target dan Realisasi Persentase Kenaikan Nilai NTPHP

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Persentase Kenaikan Nilai NTPHP (%)	0,25	0,25	0,25	0,66	0,66	264%	264%	264%

Tahun 2023 Persentase Kenaikan Nilai NTPHP ditargetkan sebesar 0,25. Capaian realisasi Persentase Kenaikan Nilai NTPHP adalah 0,66 dengan perolehan nilai NTPHP sebesar 104,67, persentase kenaikan nilai NTPHP pada tahun 2023 setara dengan 264% dari target. Jika dibandingkan dengan target renstra jangka menengah 2020-2024 Ditjen PDSPKP realisasi tahun 2023 telah tercapai melebihi target. Capaian Persentase Kenaikan Nilai NTPHP tidak ada pada periode tahun 2022 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Persentase Kenaikan Nilai NTPHP sebesar Rp840.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp 839.963.250,00 atau sebesar 99,99% dari alokasi anggaran.

Pada Triwulan IV tahun 2023, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, antara lain :

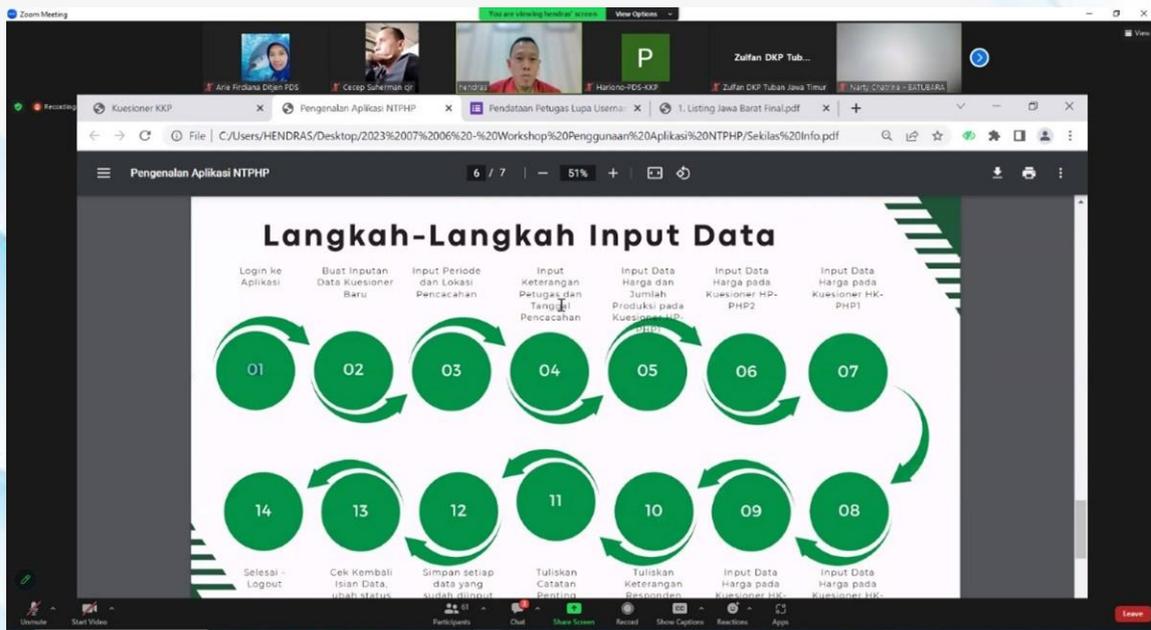
1. Telah dilakukan sosialisasi dan pendampingan kepada petugas NTPHP daerah yang baru;
2. Telah melaksanakan monitoring penginputan data NTPHP melalui aplikasi *ntphp.kkp.go.id* dan koordinasi dengan tim pencacah dan pengawas daerah melalui *whatsapp group*;



3. Telah melaksanakan kegiatan validasi dan perhitungan NTPHP Semester II Tahun 2023 pada tanggal 25 – 27 November 2023 di Bogor, Jawa Barat dan Finalisasi pada tanggal 8-10 Desember 2023;
4. Telah dijadwalkan dan dilaksanakan verifikasi lapang NTPHP di Kabupaten Takalar, Kabupaten Bulukumba pada September 2023 dan di Kabupaten Cirebon pada November 2023.



Gambar 13 Kegiatan Pendampingan Pengumpulan data Tim NTPHP ke beberapa lokasi kab/kota sampel dan Penginputan Data NTPHP



Gambar 14 Pendampingan online petugas baru Tim NTPHP Daerah

The image shows the eKuesioner application interface. The main content area displays a table titled "List Kuesioner" with the following data:

No	Pencacah	Tahun	Bulan	Provinsi	Kab / Kota	Approved	Pemeriksa	Status	Actions
1	Sony Panjaitan	2023	Februari	Sumatera Utara	Deli Serdang	Belum Diperiksa		Lengkap	<a href="#">Isi Kuesioner</a> <a href="#">Delete</a>
2	Anies Widayastuti	2023	Desember	Jawa Tengah	Rembang	Belum Diperiksa		Lengkap	<a href="#">Isi Kuesioner</a> <a href="#">Delete</a>
3	hidayatus shoimah, s.pi	2023	Juni	Jawa Tengah	Demak	Belum Diperiksa		Lengkap	<a href="#">Isi Kuesioner</a> <a href="#">Delete</a>
4	Fatin Diyan Fauziyyah	2023	Desember	Jawa Tengah	Kendal	Belum Diperiksa		Lengkap	<a href="#">Isi Kuesioner</a> <a href="#">Delete</a>
5	hidayatus shoimah, s.pi	2023	Desember	Jawa Tengah	Demak	Belum Diperiksa		Lengkap	<a href="#">Isi Kuesioner</a> <a href="#">Delete</a>
6	Sony Panjaitan	2023	Maret	Sumatera Utara	Deli Serdang	Belum Diperiksa		Lengkap	<a href="#">Isi Kuesioner</a> <a href="#">Delete</a>

Gambar 15 Monitoring inputasi data dari Tim NTPHP Daerah pada aplikasi NTPHP





Gambar 16 Kegiatan Validasi dan Penghitungan NTPHP Semester II Tahun 2023



Gambar 17 Kegiatan Verifikasi Lapang NTPHP di Kabupaten Takalar, Kabupaten Bulukumba pada September 2023

### **3.2.8 Sasaran Kegiatan 8. Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan**

#### **3.2.8.1 Indikator Kinerja 8**

##### **Pabrik Es Yang Dibangun (Unit)**

Pada tahun 2023, target Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan adalah sebesar 3 Unit Pabrik Es yang dibangun. Pabrik Es yang dibangun merupakan Bantuan Pemerintah yang berupa bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin pabrik es yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pembangunan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Aparat Penegak Hukum (APH).

Pencapaian target dilakukan dengan menghitung jumlah bangunan pabrik es yang dapat dibangun dengan rumus sebagai berikut :

$$\mathbf{PE = \Sigma PE}$$

Keterangan :

PE = Pabrik Es yang Dibangun

$\Sigma PE$  = Jumlah Pabrik Es yang Dibangun



Table 10 Target dan Realisasi Pabrik Es Yang Dibangun

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Pabrik Es Yang Dibangun (unit)	3	2	3	3	3	100%	150%	100%

Tahun 2023 Pabrik Es Yang Dibangun ditargetkan sebesar 2 unit dan program kegiatan pendukung Kalamo 1 unit, sehingga target 2023 sebanyak 3 unit. Capaian realisasi pada Triwulan IV adalah 3 unit atau setara dengan 100% dari target. Jika dibandingkan dengan target renstra jangka menengah 2020-2024, capaian realisasi tahun 2023 telah melebihi target sebesar 50%. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan target pada periode tahun 2023 sebesar 1 unit atau 50% dari target renstra jangka menengah 2020-2024. Indikator kinerja Pabrik Es Yang Dibangun belum ada pada tahun 2022 sehingga capaian realisasi tidak dapat dibandingkan.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pabrik Es Yang Dibangun sebesar Rp10.474.390.000,00 dan terdapat penambahan anggaran untuk pembangunan 1 unit Pabrik Es mendukung Kampung Nelayan Modern (Kalamo) sebesar Rp1.907.250.000,00. Oleh sebab itu alokasi anggaran pada indikator kinerja Pabrik Es Yang Dibangun menjadi Rp12.381.640.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV 2023 sebesar Rp 12.352.902.750,00 atau sebesar 99,77% dari total alokasi anggaran. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp28.737.250,00 atau 0,23% dari pagu anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran tersebut juga dapat dilihat dari capaian realisasi indikator kinerja dimana penggunaan

anggaran sebesar 99,77% dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja pabrik es yang dibangun meliputi :

1. Identifikasi/ verifikasi calon penerima bantuan pemerintah;
2. Penyusunan analisa kelayakan dan penyusunan perencanaan teknis;
3. Proses lelang dan pengadaan;
4. Monitoring Pembangunan dengan melakukan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan untuk mendorong penyelesaian pembangunan;
5. Penyerahan bantuan dan monitoring pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan IV 2023, antara lain :

1. Proses penyelesaian pembangunan fisik Pabrik Es di Kab. Biak Numfor, Pabrik Es di Kab. Pulau Taliabu, dan Pabrik Es Mendukung Kampung Nelayan Maju di Desa Binyeri Kab. Biak Numfor.
2. *Provisional Hand Over* (PHO) Pabrik Es di Kab. Pulau Taliabu pada tanggal 21 November 2023 dan telah dilaksanakan pelatihan calon operator,
3. *Provisional Hand Over* (PHO) Pabrik Es Mendukung Kampung Nelayan di Binyeri, Kab. Biak Numfor pada tanggal 1 November 2023 dan telah dilaksanakan pelatihan calon operator.
4. *Provisional Hand Over* (PHO) Pabrik Es di Kab. Biak Numfor pada tanggal 28 November 2023 dan telah dilaksanakan pelatihan calon operator.
5. Penyerahan bantuan pembangunan pabrik es kepada Pemerintah daerah :



- Pabrik Es di Kab. Pulau Taliabu kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Taliabu sesuai BAST Nomor B.7992//DJPDSPKP.0/PL.740/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023,
- Pabrik Es di Kab. Biak Numfor kepada Dinas Perikanan Kab. Biak Numfor sesuai BAST Nomor B.7992.a/DJPDSPKP.0/PL.740/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023,
- Pabrik Es Mendukung Kampung Nelayan Maju di Binyeri, Kab. Biak Numfor sesuai BAST Nomor B.7992.b/DJPDSPKP.0/PL.740/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023.

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya diantaranya adalah melakukan monitoring berupa rapat koordinasi dan kunjungan lapangan.

### **3.2.9 Sasaran Kegiatan 9. Tersedianya Bantuan Peralatan/ Sarana Pengolahan Produk Kelautan Dan Perikanan**

#### **3.2.9.1 Indikator Kinerja 9**

##### ***Chest Freezer Yang Disediakan (Unit)***

Bantuan Pemerintah berupa mesin penyimpanan beku (chest freezer) yang berfungsi menyimpan hasil perikanan dalam skala kecil. Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ varifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Anggota DPR, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Kegiatan *chest freezer* yang disalurkan ini bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir terutama bagi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil. Ruang lingkup kegiatan ini adalah pengadaan sistem rantai dingin (*chest freezer*). Dengan demikian, diharapkan UMK dapat meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi UMK.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah *Chest Freezer* Yang Disediakan dengan rumus sebagai berikut :

$$CF = \Sigma CF$$

Keterangan :

CF = *Chest freezer* yang Disediakan

$\Sigma CF$  = Jumlah *Chest freezer* yang Disediakan

Table 11 Target dan Realisasi *Chest Freezer* Yang Disediakan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
<i>Chest Freezer</i> Yang Disediakan (unit)	300	300	300	305	305	101,67%	101,67%	101,67%

Tahun 2023 *Chest Freezer* Yang Disediakan ditargetkan sebesar 300 unit. Capaian realisasi pada Triwulan IV adalah 305 unit atau setara dengan 101,67% dari target. Jika dibandingkan dengan target renstra jangka menengah 2020-2024, capaian realisasi tahun 2023 telah melebihi target sebesar 1,67%. Indikator kinerja *Chest Freezer* Yang Disediakan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 309 unit, maka realisasi



pada tahun 2023 mengalami penurunan secara kuantitas sebesar 4 unit atau setara dengan 1,3%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja *Chest Freezer* Yang Disediakan sebesar Rp2.686.200.000,00 dan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp2.634.864.800,00 atau sebesar 98,09% dari alokasi anggaran. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp51.335.200,00 atau setara dengan 1,91% dengan capaian realisasi yang melebihi target. Efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari persentase capaian realisasi indikator kinerja yang melebihi dari target (101,67%) dengan persentase penggunaan anggaran sebesar 98,09%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja *Chest Freezer* Yang Disediakan pada Triwulan III antara lain:

1. Penyelesaian Pengiriman *Chest Freezer* dan melakukan koordinasi dengan Dinas Kab/Kota sebagai pemantauan *chest freezer* yang telah sampai di Dinas;
2. Berkoordinasi dengan Dinas Kab/Kota terkait penyelesaian BAST kepada kelompok penerima bantuan *Chest freezer*;
3. Dilakukan uji petik monitoring pemanfaatan *Chest Freezer* yang melibatkan Tim Auditor Inspektorat IV dan Satgas Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung RI.



Gambar 18 Uji Petik Pemanfaatan Chest Freezer bersama Satgas Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung di Kota Bandar Lampung

### 3.2.9.2 Indikator Kinerja 10

#### Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (Unit)

Peralatan pengolahan ikan yang disediakan merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa peralatan yang digunakan untuk penanganan dan pengolahan ikan. Adapun paket peralatan yang disediakan antara lain : peralatan pengolahan pindang ikan (termasuk jenis olahan pindang presto atau yang sejenis)/pengasapan ikan/pelumatan daging (bakso dan *value added*)/pengasinan ikan atau ikan kering/kerupuk ikan (termasuk jenis olahan keripik atau yang sejenis)/fermentasi (kecap, terasi)/peralatan pengolahan ikan lainnya (abon dan lain-lain). Apabila terdapat jenis peralatan pengolahan ikan



diluar spesifikasi yang disebutkan di atas calon penerima/penerima dapat melakukan penyesuaian dengan persetujuan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan berdasarkan reuiu dari Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Indikator Kinerja Peralatan pengolahan ikan yang disediakan bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir, baik itu untuk produk pangan maupun nonpangan, terutama bagi Unit Pengolahan Ikan serta Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil. Dengan demikian, diharapkan UPI Skala Mikro dan Kecil dapat meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga, sehingga dapat memberikan nilai tambah produknya.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan dengan rumus sebagai berikut :

$$PP = \Sigma PP$$

Keterangan :

PP = Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan

$\Sigma PP$  = Jumlah Peralatan Pengolahan Ikan yang Disediakan

Table 12 Target dan Realisasi Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan (paket)	315	200	315	316	316	100,32%	158,00%	100,32%

Tahun 2023 Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan ditargetkan sebesar 315 unit. Capaian realisasi pada Triwulan IV adalah 316 unit atau setara dengan 100,32% dari target. Jika dibandingkan dengan target renstra jangka menengah 2020-2024, capaian realisasi tahun 2023 telah melebihi target sebesar 58%, hal ini dikarenakan terdapat penambahan target pada periode tahun 2023. Indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 205 unit, maka realisasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan secara kuantitas sebesar 111 unit atau setara dengan 54,15%.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan sebesar Rp8.385.300.000,00 dan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp 8.378.677.594,00 atau sebesar 99,92% dari alokasi anggaran. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp6.622.406,00 atau setara dengan 0,08%. Efisiensi penggunaan anggaran juga dapat dilihat dari persentase capaian realisasi indikator kinerja yang melebihi dari target (100,32%) dengan persentase penggunaan anggaran sebesar 99,92%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Peralatan Pengolahan Ikan Yang Disediakan pada Triwulan IV antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan penyedia secara intensif melalui pesan whatsapp dan kunjungan ke gudang penyimpanan agar proses pengadaan dan proses pengiriman kepada penerima dapat dipercepat;
2. Monitoring pengadaan peralatan pengolahan ikan dengan kunjungan ke gudang penyimpanan;
3. Berkoordinasi dengan Dinas Kab/Kota terkait pemantauan chest paket peralatan pengolahan yang telah sampai di Dinas;



4. Proses penyelesaian BAST kepada kelompok penerima bantuan Peralatan Pengolahan Ikan;
5. Monitoring pemanfaatan peralatan pengolahan ikan di beberapa lokasi seperti Kab. Jepara dan Kab. temanggung;
6. Pendampingan Monitoring Pemanfaatan oleh Satgas Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksanaan Agung RI.



Gambar 19 Penerimaan Bantuan Peralatan Pengolahan Ikan di Kab. Jepara dan Kab. Temanggung



Gambar 20 Pendampingan Monitoring Pemanfaatan oleh Satgas Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung RI di Kabupaten Lampung Selatan



Gambar 21 koordinasi dengan penyedia secara intensif untuk percepatan proses pengiriman kepada penerima



### 3.2.9.3 Indikator Kinerja 11

#### Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit)

Merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa tempat dan peralatan *portable* yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pasca panen sebelum diolah lebih lanjut.

Kompleksitas pekerjaan yang meliputi identifikasi/ verifikasi calon penerima bantuan pemerintah, penyusunan analisa kelayakan, penentuan spesifikasi teknis yang sesuai dengan kebutuhan, monitoring pengadaan sampai dengan pemanfaatan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian banyak dipengaruhi faktor eksternal seperti LPSE, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Penyedia ekatalog, Aparat Penegak Hukum (APH).

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Sarana Pasca Panen Yang Disediakan dengan rumus sebagai berikut :

$$SPP = \Sigma SPP_r + \Sigma SPP_{MK} + \Sigma SPP_{RT}$$

Keterangan :

SPP	=	Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen
$\Sigma SPP_r$	=	Jumlah sarana pasca panen yang disalurkan ( <i>regular</i> )
$\Sigma SPP_{MK}$	=	Jumlah sarana pasca panen Mendukung Korporasi yang disalurkan
$\Sigma SPP_{RT}$	=	Jumlah sarana pasca panen yang mendukung revitalisasi tambak

Table 13 Target dan Realisasi Sarana Pasca Panen Yang Disediakan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Sarana Pasca Panen Yang Disediakan (Unit)	9	-	9	9	9	100%	-	100%

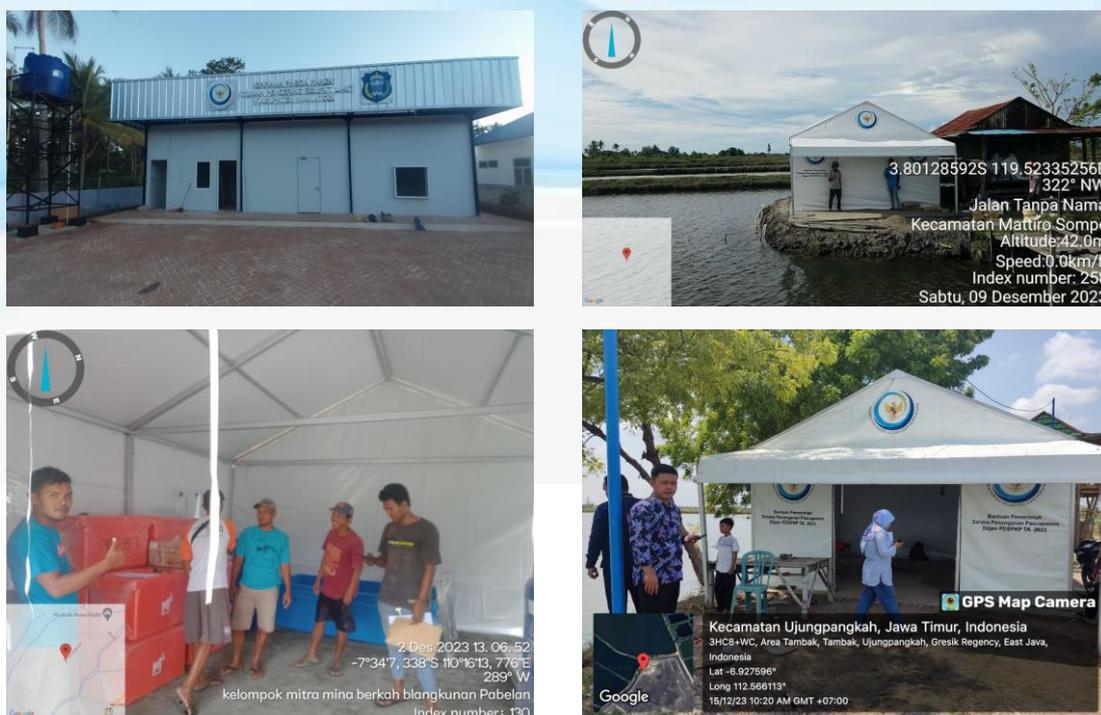
Tahun 2023 Sarana Pasca Panen Yang Disediakan sebesar 9 unit yang terdiri dari 5 unit untuk sarana pasca panen regular, 2 unit untuk sarana pasca panen yang mendukung MP Korporasi, dan 2 unit untuk sarana pasca panen yang mendukung revitalisasi tambak. Capaian realisasi pada Triwulan IV adalah 9 unit atau setara dengan 100% dari target. Indikator Sarana Pasca Panen Yang Disediakan tidak terdapat dalam renstra jangka menengah 2020-2024, sehingga capaian realisasi tahun 2023 tidak dapat dibandingkan. Indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 1 unit, maka realisasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan secara kuantitas sebesar 8 unit, hal ini dikarenakan terdapat penambahan target pada periode tahun 2023.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan sebesar Rp 4.363.000.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp4.252.604.310,00 atau sebesar 97,94% dari alokasi anggaran. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp110.395.690,00 atau setara dengan 2,06%. Efisiensi penggunaan anggaran juga dapat dilihat dari persentase capaian realisasi indikator kinerja yang sesuai target (100%) dengan persentase penggunaan anggaran sebesar 97,94%.



Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Sarana Pasca Panen Yang Disediakan pada Triwulan IV adalah :

- a. Berkoordinasi dengan Dinas KP terkait penyiapan lokasi Sarana Pasca Panen melalui kunjungan ke Dinas KP;
- b. Proses pengadaan barang Sarana Pascapanen oleh penyedia;
- c. Pengiriman Sarana Pascapanen ke 9 kab/kota;
- d. Monitoring dan penandatanganan BAST di Kab. Pringsewu, Kab. Pati, Kab. Gresik, Kab. Pinrang, Kab. Magelang, Kab. Pasuruan, Kab. Indramayu, Kab. Lebak, Kab. Wakatobi;
- e. Pendampingan Monitoring Pemanfaatan oleh Satgas Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung RI.



Gambar 22 Penerimaan Bantuan Sarana Pascapanen di kab. Wakatobi, kab. Pinrang, kab. Magelang dan kab. Gresik



Gambar 23 Pendampingan Monitoring Pemanfaatan oleh Satgas Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung RI di Kabupaten Pring Sewu



Gambar 24 Koordinasi dengan Dinas KP terkait penyiapan lokasi





Gambar 25 Koordinasi dengan Penyedia dalam rangka kegiatan Percepatan proses pekerjaan

### **3.2.10 Sasaran Kegiatan 10. Terlaksananya Pembinaan Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan Dan Perikanan**

#### **3.2.10.1 Indikator Kinerja 12**

##### **Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM)**

Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang dibina merupakan bentuk usaha pembinaan terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat dan pelaku usaha bidang perikanan. Pada tahun 2023, target Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang

Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan sebanyak 1.800 UMKM.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \sum n_{mutu}$$

**Keterangan :**

n = Jumlah Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan

$\sum n_{mutu}$  = Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka pembinaan mutu



Table 14 Target dan Realisasi Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan (UMKM)	1.800	400	490	1.800	490	100%	450%	100%

Tahun 2023 Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan ditargetkan sebesar 1.800. Capaian realisasi pada Triwulan IV adalah 490 UMKM atau setara dengan 100% dari target. Capaian secara kumulatif Tahun 2023 adalah 1.800 UMKM atau sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target renstra jangka menengah 2020-2024, capaian realisasi tahun 2023 telah melebihi target sebesar 4,5 kali lipat. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan target pada periode tahun 2023 sebesar 1.200 UMKM dari target renstra jangka menengah 2020-2024. Indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan pada tahun 2022 terealisasi sebesar 1.800

UMKM, maka realisasi pada tahun 2023 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. Capaian realisasi indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 secara rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 34,8%. Tahun 2023 unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil KP skala Mikro dan Kecil dipecah menjadi dua indikator berdasarkan rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan dan rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan sebesar Rp 1.842.292.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan pada Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp 1.842.157.400,00 atau sebesar 99,99% dari alokasi anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari persentase capaian realisasi indikator kinerja yang sesuai target (100%) dengan persentase penggunaan anggaran sebesar 99,99%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan pada Triwulan IV dan sebagai tindak lanjut terhadap rekomendasi dari triwulan sebelumnya antara lain:

1. Melakukan Pembinaan Lapangan ke UPI skala mikro dan kecil di Provinsi Kepulauan Riau (Kab. Bintan, Kab. Lingga), Jawa Timur (Kab. Banyuwangi, Kab. Blitar, Kota Blitar, Kab. Gresik), Jawa Tengah (Kab. Pati), DI Yogyakarta (Kab. Bantul, Kab. Sleman, Kab. Pekalongan), Jawa Barat (Kab. Bekasi, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Bogor, Kota Bogor), DKI Jakarta;



2. Melakukan Pembinaan Lapangan ke Sentra Pengolahan di Kabupaten Demak;
3. Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 bagi Pembina Mutu Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
4. Bimbingan Teknis *British Retail Consortium Global Standard* (BRCGS) *Issue 9* bagi Pembina Mutu Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
5. Bimbingan Teknis Pemutakhiran Cara Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Baik Berbasis Resiko bagi Pembina Mutu Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
6. Bimbingan Teknis Teknologi Pengolahan dan Nilai Tambah Hasil Perikanan bagi Pembina Mutu Lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.





Gambar 26 Pembinaan UPI terkait Mutu (Penerapan Kelayakan Dasar Pengolahan)



Gambar 27 Pemantauan Progress Kegiatan Bedah UPI dan Rehabilitasi Sentra Pengolahan Tahun 2023



### 3.2.10.2 Indikator Kinerja 13

#### **Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM)**

Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk merupakan bentuk usaha pembinaan terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan ragam produk dengan nilai tambah tinggi yang dihasilkan Unit Pengolah Ikan Skala Mikro dan Kecil. Pada tahun 2023, target Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk sebanyak 875 UMKM.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk dengan rumus sebagai berikut :

$$n = \sum n_{\text{ragam}}$$

#### **Keterangan :**

n = Jumlah Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk

$\sum n_{\text{ragam}}$  = Jumlah Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam rangka diversifikasi produk

Table 15 Target dan Realisasi Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk (UMKM)	875	-	250	875	250	100,00%	#DIV/0!	100,00%

Tahun 2023 Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk ditargetkan sebesar 875 UMKM. Capaian realisasi pada Triwulan IV adalah 250 UMKM atau setara dengan 100% dari target. Capaian realisasi secara akumulatif adalah 875 UMKM atau setara dengan 100%. Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk tidak terdapat dalam renstra jangka menengah 2020-2024, sehingga capaian realisasi tahun 2023 tidak dapat dibandingkan. Indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan



Ragam Dan Diversifikasi Produk tidak terdapat pada tahun 2022 sehingga capaian realisasi tidak dapat dibandingkan. Tahun 2023, unit penanganan dan unit pengolahan produk hasil KP skala Mikro dan Kecil dipecah menjadi dua indikator berdasarkan rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan dan rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk sebesar Rp6.744.608.000,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan pada Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp6.744.558.250,00 atau sebesar 99,99% dari alokasi anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari persentase capaian realisasi indikator kinerja yang sesuai target (100%) dengan persentase penggunaan anggaran sebesar 99,99%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk pada Triwulan IV antara lain:

1. Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Perikanan di Kota Palopo, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Magelang, Kabupaten Bireun, Mamuju, Ponorogo, Kota Bogor, Kabupaten Bone, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Alih Teknologi Produk KP Bernilai Tambah tinggi dan Kemasan Ramah Lingkungan;
3. Lomba Inovasi Produk Perikanan;
4. Bimtek Pengolahan dan Nilai Tambah di Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Biak.



Gambar 28 Sosialisasi Mutu dan Nilai Tambah dan Pembinaan UPI terkait Diversifikasi Produk

### 3.2.10.3 Indikator Kinerja 14

#### UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina (Industri)

Sebagai upaya mewujudkan produk perikanan Indonesia yang bersaing di pasar regional maupun global sesuai dengan persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka dilakukan kegiatan pembinaan bagi Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan. Unit Penanganan dan unit Pengolahan produk hasil Kelautan dan Perikanan merupakan jumlah unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala menengah dan besar yang telah dibina dalam satu periode waktu. Pada tahun 2023, target UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina sebanyak 1.070 industri.

Pencapaian target ini dilakukan dengan menghitung jumlah UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \sum IMB$$

**Keterangan :**



- P = Unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala menengah dan besar yang telah dibina
- $\sum IMB$  = Jumlah unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala menengah dan besar yang telah dibina

Table 16 Target dan Realisasi UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina (Industri)	1.070	100	185	1.070	185	100%	1070%	100%

Tahun 2023 UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina ditargetkan sebesar 1.070. Capaian realisasi pada Triwulan IV adalah 185 UMKM atau setara dengan 100% dari target. Capaian realisasi secara akumulatif pada tahun 2023 adalah 1.070 industri atau setara dengan 100%. Jika dibandingkan dengan target renstra jangka menengah 2020-2024, capaian realisasi tahun 2023 telah melebihi target sebesar 10 kali lipat. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan target pada periode tahun 2023 sebesar 970 industri dari target renstra jangka menengah 2020-2024. Indikator kinerja UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina pada tahun 2022 terealisasi sebesar 300 industri, maka

realisasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan secara kuantitas sebesar 770 industri.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina sebesar Rp840.000.000,00 dengan realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sebesar Rp839.870.700,00 atau sebesar 99,98% dari alokasi anggaran.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja UPI Skala Menengah Dan Besar Yang Dibina pada Triwulan IV yaitu :

1. Telah dilaksanakan profiling dan utilitas unit pengolahan ikan (UPI) skala menengah dan besar dalam upaya penyajian data UPI skala menengah dan besar dan perolehan data yang dapat di pertanggungjawabkan secara statistik untuk selanjutnya menjadi dasar pengambilan kebijakan Ditjen PDSPKP. Kegiatan dilaksnakaan pada tanggal 19 Oktober 2023;
2. Telah dilaksanakan Bimbingan teknis upaya pencegahan potensi cemaran *salmonella* pada penanganan dan pengolahan produk perikanan pada tanggal 8 November 2023. Kegiatan dilakukan dalam rangka memberikan pembinaan kepada unit pengolahan ikan (UPI) agar melakukan pengolahan secara bertanggung jawab serta sesuai dengan kaidah jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan sejak proses produksi, penanganan/pengolahan, distribusi sampai pemasaran sehingga terbebas dari cemaran *salmonella*;
3. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Teknis Hilirisasi Tuna Menuju Tahun Tuna 2024 pada tanggal 27 November 2023. Rapat Koordinasi bertujuan untuk membahas *policy brief* sebagai output dari Tim Teknis Hilirisasi Tuna dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan hulu hilir serta strategi, solusi dan

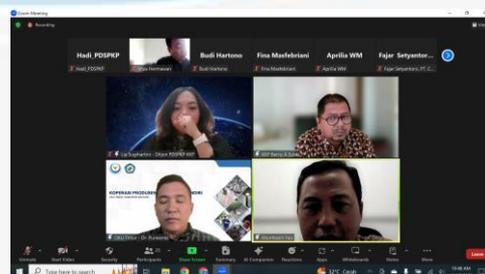


rekomendasi teknis dalam penguatan daya saing industri pengolahan tuna menuju Tahun Tuna 2024;

4. Telah dilaksanakan monitoring progres pemanfaatan *Integrated Cold Storage* (ICS) di Kabupaten Sumenep pada tanggal 6-8 Desember 2023;
5. Telah dilaksanakan rapat pemantauan pemanfaatan ICS, pabrik rumput laut dan pabrik tepung ikan pada tanggal 13 Desember 2023. Tujuan dilakukan rapat adalah untuk melakukan koordinasi tindak lanjut hasil kunjungan lapangan ke ICS Kabupaten Sumenep serta tindak lanjut upaya percepatan pemanfaatan ICS, pabrik rumput laut dan pabrik tepung ikan;
6. Telah dilaksanakan Rapat Penguatan Hulu Hilir Unit Pengolahan Filet Patin pada tanggal 15 Desember 2023. Rapat dilaksanakan dalam rangka untuk mengoptimalkan ketersediaan bahan baku komoditas patin sesuai spesifikasi unit pengolahan filet patin;
7. Telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Sinergi dan Kolaborasi Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada tanggal 20 Desember 2023. Kegiatan FGD bertujuan untuk menyiapkan bahan terkait Penguatan Hilirisasi Industri Pengolahan Tuna Dan Penyusunan Rencana Aksi Menuju Tahun 2024;
8. Telah dilaksanakan pembinaan kepada unit pengolahan ikan (UPI) di Kabupaten Karawang pada tanggal 21-22 Desember 2023. Pembinaan dilakukan dalam rangka penerapan kelayakan dasar pengolahan (GMP dan SSOP) di UPI.



Gambar 29 Rapat Koordinasi Tim Teknis Hilirisasi Tuna Menuju Tahun Tuna 2024



Gambar 30 Rapat Penguatan Hulu Hilir Unit Pengolahan Filet Patin

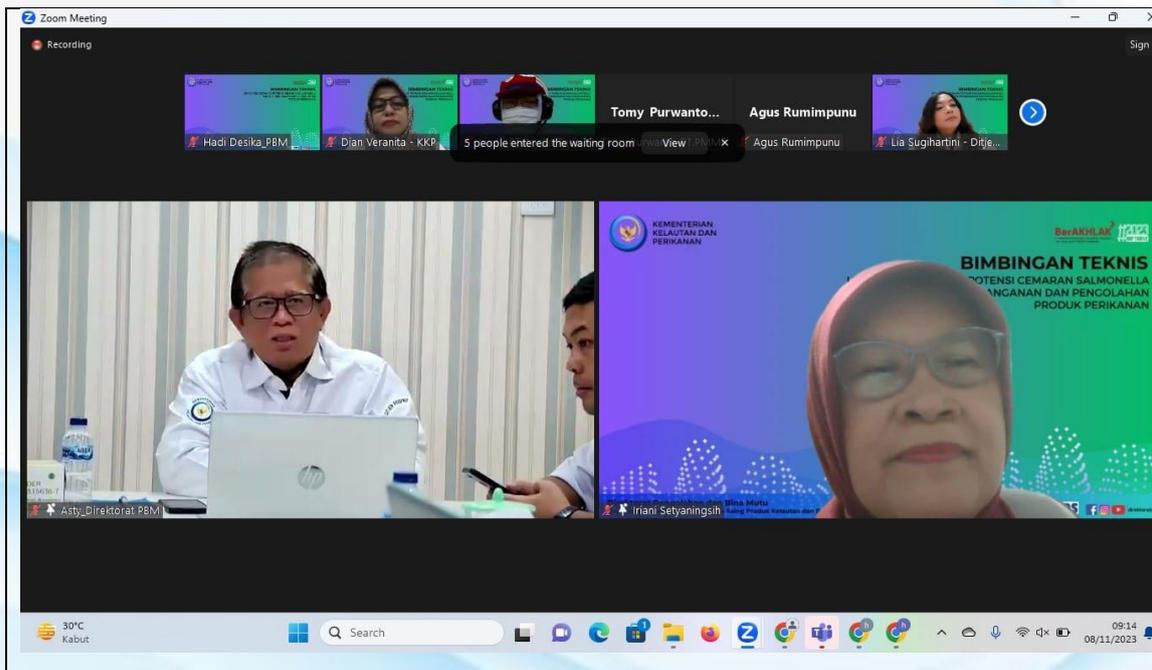




Gambar 31 *Focus Group Discussion* (FGD) Sinergi dan Kolaborasi Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Gambar 32 Koordinasi Dengan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Update Pemanfaatan Bantuan Pemerintah



Gambar 33 Koordinasi Dengan Instansi Lain Yang Memiliki Kompetensi Terkait Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan Dan Perikanan

### **3.2.11 Sasaran Kegiatan 11. Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lingkup Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu**

#### **3.2.11.1 Indikator Kinerja 15**

##### **Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)**

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi.

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;



3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK akan ditetapkan melalui SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan.

Pada tahun 2023, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu ditargetkan menjadi salah satu unit kerja yang berpredikat menuju WBK. Target Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai) adalah sebesar 75.

Syarat unit kerja yang dapat ditetapkan sebagai Menuju WBK adalah:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
- c. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
- d. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Table 17 Target dan Realisasi Nilai Minimal Yang Diperseharatkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Nilai Minimal Yang Diperseharatkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)	75	75	75	84,03	84,03	112%	112%	112%

Tahun 2023 Nilai Minimal Yang Diperseharatkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu ditargetkan sebesar 75. Capaian realisasi pada Triwulan IV adalah 84,03 atau setara dengan 112,04% dari target. Capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 84,03 atau setara 112%. Indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperseharatkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu jika dibandingkan dengan renstra jangka menengah 2020-2024, capaian realisasi tahun 2023 sebesar 112,04. Indikator kinerja Nilai Minimal Yang Diperseharatkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada tahun 2022 terealisasi sebesar 85,64, maka realisasi pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,61.



Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan IV antara lain:

1. Telah dilakukan *weekly briefing* Reformasi Birokrasi secara rutin di lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu,
2. Melakukan rapat dalam rangka penetapan tim kerja WBK baru di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
3. Mengikuti rapat pemantauan perkembangan Pembangunan zona integritas lingkup DJPDSPKP pada Bulan Oktober;
4. Melakukan penginputan data dukung untuk periode semester 2 tahun 2023 pada LKE WBK Itjen IV.



Gambar 34 Rapat Dalam Rangka Penetapan Tim Kerja WBK Baru

### 3.2.11.2 Indikator Kinerja 16

#### **Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)**

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

- a. Kualifikasi;
- b. Kompetensi;
- c. Kinerja; dan
- d. Disiplin

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan



f. Pendidikan di bawah SLTA.

Dengan formulasi sebagai berikut :

Table 18 Formulasi Penilaian terhadap Tingkat Pendidikan

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Table 19 Formulasi Penilaian terhadap Kompetensi

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	<b>Diklat Struktural</b>	15	-	-
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	<b>Diklat Fungsional</b>	-	15	-
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	<b>Diklat 20 JP</b>	15	15	22.5
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	<b>Seminar</b>	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	<b>Total Mengikuti Kompetensi</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi :

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

Table 20 Formulasi Pengukuran Tingkat Kinerja

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Table 21 Formulasi Pengukuran Terkait Disiplin

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

Indeks Profesionalitas ASN Dirketorat Pengolahan dan Bina Mutu tahun 2023 ditargetkan sebesar 83,5. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP,
- **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
  - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsionak/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;



- **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
  - **Pejabat Fungsional** wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
  - **Pejabat Fungsional Umum** wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
- **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
  - **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

$$IPLev 2 = \text{Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2}$$

$$IPLev 1 = IPASN \text{ Pejabat Lev 1+ Rerata Nilai IPLev 2}$$

Gambar 5 Rumus Matematis Perhitungan IPASN

Table 22 Kategori Penilaian IPASN

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

Table 23 Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Indeks)	83,2	75	83,2	92,14	92,14	111%	123%	111%

Tahun 2023 Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu ditargetkan sebesar 83,2. Capaian realisasi pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah 92,14 atau setara dengan 110,75% dari target. Capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah 92,14 atau setara



dengan 110,75%. Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu jika dibandingkan dengan renstra jangka menengah 2020-2024, capaian realisasi tahun 2023 sebesar 122,85. Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada tahun 2022 terealisasi sebesar 87,45, maka realisasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 5,36%. Selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,71%.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan IV antara lain:

1. Mengingatkan secara rutin kepada pegawai untuk melakukan *update* data diklat/pelatihan kedalam aplikasi *e-pegawai*;
2. Pegawai mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, dan sosialisasi yang sesuai dengan bidang pengolahan dan pembinaan mutu yang dapat menambah kompetensi pegawai;
3. Melakukan penginputan sertifikat dari kegiatan diklat maupun pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai pada aplikasi *e-pegawai*.

### **3.2.11.3 Indikator Kinerja 17**

#### **Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)**

Nilai PM SAKIP Lingkup Direktorat PBM dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai

PM SAKIP Direktorat PBM merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Direktorat PBM.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai) tahun 2023 ditargetkan sebesar 80,5. Nilai PM SAKIP Direktorat PBM adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri Eselon I Ditjen PDSPKP dengan kategori penilaian sebagai berikut :

Table 24 Kategori Penilaian Mandiri SAKIP

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

Table 25 Target dan Realisasi Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Nilai)	80,5	-	80,5	86,30	86,30	107,20%	-	107,20%

Tahun 2023 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu ditargetkan sebesar 80,5. Capaian realisasi pada Triwulan IV Tahun 2023 adalah 86,3 atau setara



dengan 107,2% dari target. Indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu tidak terdapat dalam renstra jangka menengah 2020-2024, sehingga capaian realisasi tahun 2023 tidak dapat dibandingkan. Indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu tidak terdapat pada tahun 2022 capaian realisasi tahun 2023 tidak dapat dibandingkan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu antara lain:

1. Keikutsertaan pada kegiatan reviu perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, rincian target indikator kinerja, rencana aksi atas perjanjian kinerja, pohon kinerja, dan matriks *cascading* lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2023 pada tanggal 3 Juli 2023;
2. Keikutsertaan pada kegiatan Pembahasan revisi renstra dan pohon kinerja tematik pada tanggal 13 Juli 2023;
3. Keikutsertaan pada kegiatan revisi Rencana Strategis (Renstra) serta adanya rencana penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Lingkup Ditjen PDSPKP di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2023. Kegiatan dimaksud melibatkan Biro perencanaan Sekretariat Jenderal KKP dan Kementerian PPN/Bappenas;
4. Keikutsertaan pada kegiatan pengukuran kinerja, verifikasi data capaian kinerja, penyusunan laporan kinerja, dan penyusunan evaluasi rencana aksi dilakukan secara berkala triwulanan;
5. Penyampaian laporan kinerja yang sudah disahkan kepada Direktur Jenderal PDSPKP dan serta *stakeholders* terkait secara tepat waktu yakni paling lambat 3 minggu setelah periode pelaporan triwulanan berakhir yang dibuktikan dengan surat resmi. Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu akan meningkatkan penilaian pada aspek pelaporan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP;

6. Keikutsertaan pada kegiatan verifikasi dan validasi PMSAKIP level II yang didampingi oleh Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 24-25 Juli 2023 di Bogor.

#### **3.2.11.4 Indikator Kinerja 18**

##### **Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)**

Penyelesaian temuan LHP adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perbaikan atas laporan keuangan yang telah diperiksa. Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah nilai temuan BPK pada Direktorat PBM Tahun 2023}}{\text{Jumlah realisasi anggaran Direktorat PBM Tahun 2023}} \times 100$$



Table 26 Target dan Realisasi Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	100,0	75	100,0	100,00	100,00	100,00%	133,33%	100,00%

Tahun 2023 Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu ditargetkan sebesar 100. Capaian realisasi pada Triwulan IV adalah 100%. Capaian kinerja Tahun 2023 adalah 100 atau setara dengan 100% dari target. Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu jika dibandingkan dengan renstra jangka menengah 2020-2024, capaian realisasi tahun 2023 sebesar 133,33. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada tahun 2022 terealisasi sebesar 75, maka realisasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 33,33%.

### 3.2.11.5 Indikator Kinerja 19

#### **Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)**

Merupakan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada Direktorat PBM}} \times 100$$



Table 27 Target dan Realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	75,0	75	75,0	100,00	100,00	133,33%	133,33%	133,33%

Tahun 2023 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu ditargetkan sebesar 75. Capaian realisasi pada Triwulan IV adalah 100 yang setara dengan 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah 100 atau setara dengan 133,33% dari target. Indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu jika dibandingkan dengan renstra jangka menengah 2020-2024, capaian realisasi tahun 2023 sebesar 133,33. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100, maka realisasi pada

tahun 2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan (*stagnan*).

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan IV antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan tim kerja yang menangani terkait kegiatan yang terdapat temuan pengawasan dari Itjen KKP;
2. Melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi SIDAK;
3. Melakukan konsolidasi dengan bagian keuangan DJPDSPKP dan Itjen terkait verifikasi pemenuhan data dukung terhadap temuan hasil pengawasan.

### **3.2.11.6 Indikator Kinerja 20**

#### **Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)**

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 7/2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada

#### **- KRITERIA INOVASI**

1. Memiliki Kebaruan
2. Efektif



3. Bermanfaat
4. Dapat Ditransfer/Direplikasi
5. Berkelanjutan

- KELOMPOK INOVASI

1. Kelompok Umum
2. Kelompok Khusus

Adapun aspek penilaiannya dibagi menjadi dua yakni :

a. Aspek Penilaian Kelompok Umum :

1. Ringkasan (5%)
2. Ide Inovatif (20%)
3. Signifikansi (25%)
4. Kontribusi terhadap Capaian TPB (5%)
5. Adaptabilitas (20%)
6. Keberlanjutan (20%)
7. Kolaborasi Pemangku Kepentingan (5%)

b. Aspek Penilaian Kelompok Khusus :

1. Pembaruan/Peningkatan Inovasi (25%)
2. Adaptabilitas (20%)
3. Penguatan Keberlanjutan (25%)
4. Evaluasi (30%)

Formula Pengukuran :

- a. Eselon 2 yang ditetapkan oleh Unit Eselon I untuk mengajukan proposal inovasi kepada Tim Penilai Eselon I.

- b. Target hasil : Jumlah proposal unit kerja level 2 yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Eselon I

Formula yang digunakan untuk aspek penilaian didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 50 Tahun 2022 sebagai juklak KIPP di Tahun 2022.

Table 28 Target dan Realisasi Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (Inovasi)	1	-	1	1	1	100%	-	100%

Tahun 2023 Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu ditargetkan sebesar satu inovasi. Capaian realisasi pada Triwulan IV adalah 1 inovasi. Indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu bersifat tahunan sehingga capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah satu atau setara dengan 100% dari target. Indikator kinerja Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu tidak terdapat pada renstra jangka menengah 2020-2024, sehingga capaian realisasi pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan.



### 3.2.11.7 Indikator Kinerja 21

#### **Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)**

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Perhitungan indikator ini berasal dari penilaian Komponen Keaktifan dalam system informasi manajemen pengetahuan melalui aplikasi *Collaboration Office*.

Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan. Pembobotan yang dimaksud antara lain :

- Berbagi pengetahuan yang berasal dari kegiatan dengan memenuhi unsur 5W1H dengan sumber pengetahuan jelas akan mendapatkan poin 0,5;
- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1;
- Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

Cara pengukuran indikator kinerja Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar :

1. Menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan yang ditunjuk (*Collaboration Office*);
2. Pengukuran dilakukan setiap triwulan, dengan rincian :

- Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload;
- keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan;
- Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat Eselon 2;
- Poin diberikan untuk postingan yang memiliki unsur pengetahuan sesuai dengan kriteria pembobotan;
- Pusdatin menyediakan data hasil rekapan pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP setiap unit kerja eselon I.

Table 28 Target dan Realisasi Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar (%)	92	88	92	100	100	108,7%	113,64%	108,7%

Tahun 2023 Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan



Terstandar ditargetkan sebesar 92. Capaian realisasi Tahun 2023 adalah 100 atau setara dengan 108,7% dari target. Indikator kinerja Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar jika dibandingkan dengan renstra jangka menengah 2020-2024, capaian realisasi tahun 2023 sebesar 113,64%. Persentase Unit Kerja Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu Yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan Terstandar pada tahun 2022 terealisasi sebesar 100, maka realisasi pada tahun 2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan (*stagnan*).

### **3.2.11.8 Indikator Kinerja 22**

#### **Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)**

Anggaran yang digunakan sebagai penunjang dalam pencapaian tujuan dan sasaran untuk membiayai kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada tahun 2021 bersumber dari APBN dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-032.06.1.622131/2023 tanggal 14 Februari 2023 dengan pagu sebesar Rp. 57.470.745.000,00.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$x = \frac{\Sigma a}{b} \times 100\%$$

Keterangan :

- a = nilai anggaran yang direalisasikan (Rp)
- b = nilai pagu anggaran (Rp)
- x = Jumlah Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)

Table 29 Target dan Realisasi Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	95	-	95	99,57	99,57	104,81%	-	104,81%

Tahun 2023 Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu ditargetkan sebesar 95. Capaian realisasi pada TW IV adalah 99,57%. Capaian indikator pada Tahun 2023 adalah 99,57 atau setara dengan 104,81% dari target. Indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu tidak terdapat pada renstra jangka menengah 2020-2024, sehingga capaian realisasi pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan.

Realisasi anggaran di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu pada Tahun 2023 sebesar Rp47.288.908.554,00 atau sebesar 99,57% dari alokasi anggaran Rp47.492.040.000,00.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Realisasi Anggaran di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Triwulan IV yaitu rutin melakukan penginputan realisasi keuangan di aplikasi SAKTI.



Table 30 Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu per Indikator Kinerja

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	Persentase utilitas UPI yang meningkat	-	-	-
2.	RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan	500.000.000	499.924.600	99,98
3.	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat <i>good manufacturing practices</i> (GMP)	2.000.000.000	1.999.319.000	99,97
4.	Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (losses dan utilitas)	840.000.000	839.689.000	99,96
5.	Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah	6.069.000.000	6.064.376.900	99,92

No.	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu			
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan	-	-	-
7.	Persentase kenaikan nilai NTPHP	840.000.000	839.963.250	99,99
8.	Pabrik es yang dibangun	12.381.640.000	12.352.902.750	99,77
9.	<i>Chest freezer</i> yang disediakan	2.686.200.000	2.634.864.800	98,09
10.	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan	8.385.300.000	8.378.677.594	99,92
11.	Sarana pasca panen yang disediakan	4.363.000.000	4.252.604.310	97,94



<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Pagu (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Persentase (%)</b>
12.	Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan	1.842.292.000	1.842.157.400	99,99
13.	Unit Penanganan Dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro Dan Kecil Yang Dibina Dalam Rangka Peningkatan Ragam Dan Diversifikasi Produk	6.744.608.000	6.744.558.250	99,99
14.	UPI skala menengah dan besar yang dibina	840.000.000	839.870.700	99,98

No.	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	Jumlah	47.492.040.000	47.288.908.554	99,57

Terdapat efisiensi anggaran pada periode tahun 2023 yang ditunjukkan dari sisa anggaran sebesar Rp 203.131.446,00 atau sebesar 0,43% dari pagu anggaran dengan capaian realisasi kegiatan melebihi target. Yaitu dengan capaian realisasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 105,24%.

### 3.2.11.9 Indikator Kinerja 23

#### **Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)**

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dalam kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut:

- a. Aspek Market (40%)
- b. Aspek *Demand* (60%)

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa dihitung dari :

#### **jumlah nilai Aspek Market + Aspek *Demand***

Penilaian IKU Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dan/atau Unit Pengendali Teknis (UPT) dilakukan melalui Penilaian Mandiri masing-masing unit kerja yang dilengkapi dengan data dukung.



Table 31 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu	77,5	-	77,5	79,69	79,69	102,83%	-	102,83%

Tahun 2023 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu ditargetkan sebesar 77,5. Capaian realisasi pada TW IV adalah 79,69%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah 79,69 atau setara dengan 102,83% dari target. Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu tidak terdapat pada renstra jangka menengah 2020-2024, sehingga capaian realisasi pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu tidak terdapat pada tahun 2022 sehingga realisasi pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada Tahun 2023 antara lain :

1. Menghadiri kegiatan rapat penyusunan laporan bulanan PBJ dan Update Progres PBJ di lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada

tanggal 9-10 November 2023 di ruang rapat Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat;

2. Menghadiri kegiatan rapat penyusunan laporan bulanan PBJ dan Update Progres PBJ di lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 11-12 Desember 2023 di ruang rapat Raiser Ikan Hias Cibinong, Jawa Barat, Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dilakukan pembahasan terkait penyelesaian Pembangunan Pabrik Es, penyelesaian serah terima bantuan Chest Freezer, Peralatan pengolahan, dan sarana pasca panen, dan Pembangunan UPI NT;
3. Melakukan penghapuasan *Automatic Adjustment* (AA) pada aplikasi SIRUP.

#### **3.2.11.10 Indikator Kinerja 24**

##### **Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)**

Suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: (a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; (b) memiliki anggaran besar; mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; (c) mendukung pencapaian prioritas nasional; (d) merupakan arahan direktif presiden; dan pertimbangan lainnya.

Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV Tahun Pengukuran terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis tahun sebelumnya (T-1).

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$



Keterangan :

- PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target
- IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah
- AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Table 32 Target dan Realisasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	77,5	-	77,5	94,76	94,76	122,27%	-	122,27%

Tahun 2023 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu ditargetkan sebesar 77,5. Capaian realisasi pada TW IV adalah 94,76. Capaian kinerja pada Tahun 2023 adalah 94,76 atau setara dengan 122,27% dari target. Indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu tidak terdapat pada renstra jangka menengah 2020-2024, sehingga capaian realisasi pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu pada tahun 2022 terealisasi sebesar 93,25, maka realisasi pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,51 atau setara dengan 1,62%.



### **3.2.11.11 Indikator Kinerja 25**

#### **Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)**

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Formula perhitungan untuk menghitung Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dapat diukur dari :

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (12,5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan III tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (25%).
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 (25%)
5. Penyusunan Laporan BMN secara tepat waktu (12,55%).

Table 33 Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu

Indikator Kinerja	Target			Realisasi 2023	Realisasi TW IV	Persentase Realisasi terhadap Target (%)		
	Tahun 2023	Tahun 2024	TW IV			Tahun 2023	Target 2024	TW IV
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu (%)	77,5	-	77,5	97,50	97,50	125,81%	#DIV/0!	125,81%

Tahun 2023 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu ditargetkan sebesar 77,5. Capaian realisasi Tahun 2023 adalah 97,5 atau setara dengan 125,81% dari target. Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu tidak terdapat pada renstra jangka menengah 2020-2024, sehingga capaian realisasi pada tahun 2023 tidak dapat dibandingkan. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Di Lingkungan Direktorat Pengolahan Dan Bina Mutu tidak terdapat pada tahun 2022 sehingga capaian realisasi tahun 2023 tidak dapat dibandingkan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu antara lain :

1. Mengikuti FGD Kerjasama Pemanfaatan BMN pada tanggal 13 November 2023 di ruang rapat Kantor Pasar Ikan Modern, Muara Baru, Jakarta Utama;
2. Mengikuti rapat terkait perkembangan pengelolaan BMN di lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2023 pada tanggal 18



Desember 2023 di ruang rapat Cakalang, GMB 3 Lt. 1, Jakarta Pusat;

3. Melakukan penginputan dokumen BMN seperti BAST Bantuan Pemerintah kedalam aplikasi.

## BAB IV. PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja Tahun 2023, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Secara umum, pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja telah berjalan dengan baik;
- b. Secara rata-rata capaian realisasi indikator kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu berpredikat Baik dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang ditunjukkan dalam aplikasi *kinerjaku.kkp.go.id* adalah 105,24%;
- c. Terdapat 16 indikator kinerja yang capaian realisasinya melebihi target yang ditetapkan;
- d. Realisasi pagu anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dari pagu adalah sebesar Rp47.288.908.554,00 atau setara dengan 99,57%.

### 4.2. Permasalahan

Secara umum realisasi output kegiatan semua telah tercapai dan ada yang melebihi target, sehingga secara menyeluruh belum terdapat kendala dalam pelaksanaan pencapaian realisasi target indikator kinerja.

Secara khusus permasalahan yang dihadapi adalah penerbitan SKP yang masih terkendala kurangnya pemahaman unit pengolah maupun *stakeholder* lainnya mengenai kewajiban bagi unit pengolah dalam memiliki sertifikat SKP, terjadinya kebingungan bagi UPI untuk melakukan konsultasi karena adanya perubahan organisasi



dilingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu maupun di Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah, serta kurangnya informasi mengenai penggunaan layanan perizinan online yang terintegrasi.

### **4.3. Rekomendasi Tindak Lanjut**

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya diantaranya:

1. Melakukan pembinaan kepada unit pengolah terkait pentingnya bersertifikat SKP;
2. Melakukan sosialisasi kepada unit pengolah terkait mutu dan nilai tambah produk;

## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING**  
**PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16  
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041  
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Widya Rusyanto**  
Jabatan : Direktur Pengolahan dan Bina Mutu

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **Budi Sulistiyo**  
Jabatan : Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

**Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penguatan Daya  
Saing Produk Kelautan dan Perikanan**

**Budi Sulistiyo**

**Pihak Pertama,  
Direktur Pengolahan dan  
Bina Mutu**

**Widya Rusyanto**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Utilitas UPI yang meningkat	1.	Persentase utilitas UPI yang meningkat (%)	68
2.	Tersedianya rancangan RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan	2.	RSNI produk hasil kelautan dan perikanan yang dirumuskan (Produk)	15
3.	Terlaksananya sertifikasi produk kelautan dan perikanan	3.	Produk yang mendapat sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) / sertifikat <i>good manufacturing practices</i> (GMP) (Produk)	5.000
4.	Tersedianya layanan data dan informasi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	4.	Data profiling industri pengolahan hasil perikanan (Data)	2
5.	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	5.	Unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun dalam kawasan perikanan terpadu (Unit)	2
6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan	6.	Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan (Orang)	27.560
7.	Meningkatnya Nilai Tukar Hasil Pengolahan	7.	Persentase kenaikan nilai NTPHP (%)	0,25
8.	Tersedianya prasarana rantai dingin dan pengolahan produk kelautan dan perikanan	8.	Pabrik es yang dibangun (Unit)	3
9.	Tersedianya bantuan peralatan/sarana pengolahan produk kelautan dan perikanan	9.	<i>Chest freezer</i> yang disediakan (Unit)	300
		10.	Peralatan pengolahan ikan yang disediakan (Unit)	315
		11.	Sarana pasca panen yang disediakan (Unit)	9
10.	Terlaksananya pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan	12.	Unit penanganan dan unit Pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan mutu dan keamanan pangan (UMKM)	1.800
		13.	Unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil yang dibina dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk (UMKM)	875

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		14. UPI skala menengah dan besar yang dibina (Industri)	1.070
11	Terlaksananya layanan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	15. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Nilai)	75
		16. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)	83,2
		17. Nilai penilaian mandiri Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (PM SAKIP) lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)	80,5
		18. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di lingkungan Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	100
		19. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	75
		20. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Inovasi)	1
		21. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	92
		22. Persentase realisasi anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	95
		23. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5
		24. Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5
		25. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)	77,5



## DATA ANGGARAN

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.000)
1.	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	47.492.040
<b>Total Anggaran Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu Tahun 2023</b>		<b>47.492.040</b>

Jakarta, Desember 2023

**Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Penguatan Daya  
Saing Produk Kelautan dan Perikanan**



**Budi Sulistiyo**

**Pihak Pertama,  
Direktur Pengolahan dan  
Bina Mutu**



**Widya Rusyanto**